

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR
SEMBILAN TAHUN DI KECAMATAN BAROS
KABUPATEN SERANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

ABDUL LATIF

NIM. 6661072678

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2012

*Dalam Menghadapi Badai Kita Harus Tetap Berjalan
Dengan Membawa Dua Hal Yaitu
Keyakinan Dan Cinta*

*"tiada kata yang lebih indah selain do'a dari orang tua, saudara, dan
teman-teman"*

Skripsi Ini Ku Persembahkan :
Ibu dan Ayah Tercinta,
Saudara-saudara ku yang ku
sayang dan Kawan-Kawan Ku
yang ku banggakan.

ABSTRAK

Abdul Latif, 6661072678. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Maulana Yusuf, S.IP., M.Si., pembimbing II Ayuning Budiati, S.IP., MPPM

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Belajar Sembilan Tahun

Latar belakang masalah penelitian ini yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama pendidikan wajib belajar Sembilan tahun. terdapat dalam satu kampung banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SLTP. Fokus penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun Di kecamatan Baros.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Masyarakat Kecamatan Baros. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori Taliziduhu Ndraha. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dan kuesioner. Dalam menganalisis data digunakan uji hipotesis t-tes satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Baros masih rendah karena hasil perhitungan di peroleh 62,07 % dari angka minimal yaitu 65 %. Yang artinya tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. selain itu juga, terungkap beberapa permasalahan yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun di kecamatan baros, yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, pola pikir orang tua yang masih kolot, jarak dari sekolah kerumah dari beberapa daerah masih jauh serta kurangnya motivasi atau dorongan dari orang tua kepada anak-anak untuk meningkatkan prestasi mereka disekolah. Solusi atas permasalahan tersebut yang harus dilakukan adalah perlu adanya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi dari segenap elemen pemerintah desa setempat, perlu adanya program perbaikan ekonomi dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut serta pemerintah setempat harus lebih memperhatikan, mengawasi serta mengevaluasi program wajib belajar Sembilan tahun.

ABSTRACT

Abdul Latif, 6661072678. The Level of Public Participation in the Nine Year compulsory Education Program at Serang Regency Subdistrict of Baros. Public Administration study program, Faculty of Social and Political Sciences, Sultan Ageng Tirtayasa University. Supervising I Maulana Yusuf, S.IP., M.Si., supervising II Ayuning Budiati, S.IP., MPPM

Keywords: Public Participation, Learn Nine years

Background to the issue of this research is lack of community participation in education, especially in the education of nine years compulsory. There are in one village many children that did not proceed to the level of our junior high school. The focus of this research is The Level of Public Participation in the Nine Years compulsory Education Program at Serang Regency Subdistrict of Baros. This research method is deskriptive quantitative methods. The subject of this research is the community district of Baros. The theory that is used in this research was Taliziduhu Ndraha theory approach. The data collection teknik used the observation, interviews, and questionnaires. The data analyzing use the t-test one sampling hypothesis testing. The result of this research show that public participation in the nine years compulsory education program in Baros is still low due to the result calculation obtained 62,07 % of the minimum from 65 %. Meaning that the The Level of Public Participation in the Nine Year compulsory Education Program at Serang Regency Subdistrict of Baros still low. it also revealed some problems that caused a lack of public participation in the nine years compulsory education program in Baros District. The lack of socialization which is carried out by the government of the local area, economic factors of society still low, the mindset of the parents who is still old-fashioned, distance from school to home from some areas are still far and lack motivation or encouragement from parents to children to improve their achievement in school. The solution for these problems to do is Need support and cooperation in the form of socialization of all elements of the local village government, the need of the efforts of the government to provide socialization about how important basic education for children, need a repair progrm from the government to improve economic conditions, and local governments should pay more attention, keep an eye on and evaluate the compulsory nine years.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan penelitian ini, walaupun banyak kekurangan-kekurangan, baik materi maupun dalam bentuk penyajiannya. Solawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW

Adapun dalam proposal penelitian ini penulis buat dan sampaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian strata S-I, dengan judul penelitian **”Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang”**

Akhirnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr.Ir. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Drs. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwiana, M.Ikom., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Gandung Ismanto, S.Sos, MM. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rina Yulianti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Anis Fuad, S.sos, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Maulana Yusuf, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 (terimakasih atas segala arahan dan bimbingan sehingga penulis menjadi termotivasi, semoga Allah membalas atas kebaikan dan kemurahan hati, amin)
9. Ayuning Budiati, S.IP, M.PPM selaku dosen pembimbing 2. terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing peneliti di sela-sela kesibukan.
10. Hasuri, M.Si selaku wali akademik yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.
11. Anis Fuad, S.sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan pengetahuan selama perkuliahan.

13. Saudara-saudaraku yang kusayangi, alhamdulillah atas doa dan dukungan kalian semua adik kalian bisa menempuh pendidikan sejauh ini dan telah selesai menyelesaikan penelitian ini.
14. Untuk sahabatku, semua Teman – teman kelas A angkatan tahun 2007(terutama Edi, David, Fajar, Ami, Aidina, Agus K, Falla, dan Ijan) yang sampai saat ini masih setia menemani ku. kalian lah yang memberikan inspirasi untuk tetap semangat dan dan menikmati dalam membuat penelitian ini. Terimakasih untuk sahabat-sahabtku atas do'a dan dukungannya
15. Teman teman IKAMABA yang senantiasa selalu memberi dukungan dan support kepada ku
16. Rekan – rekan Guru MI.Jamiyatul Usbuiyah yang senantiasa memberikan doanya serta motivasinya terutama ibu Tia yang sudah mau membantu menyebarkan kuesioner.
17. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan semuanya, khususnya yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu peneliti mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini dan peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi untuk perbaikan penelitian ini dan sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai bahan acuan maupun sebagai bahan bacaan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita dalam segala hal yang kita lakukan. Amin

Serang, Februari 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSEMBAHAN KHUSUS

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISIv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR DIAGRAM ix

DAFTAR LAMPIRANx

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1.Latar Belakang Masalah 1

1.2.Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 11

1.3.Perumusan Masalah 12

1.4.Tujuan Penelitian 12

1.5.Manfaat Penelitian 13

1.6.Sistematika Penelitian 13

BAB II DESKRIPSI16

2.1.Deskripsi Teori 16

2.2.Kebijakan Publik 16

2.3.Pendidikan 20

2.4.Wajib Belajar Sembilan Tahun 24

2.5.Pemberdayaan Masyarakat 36

2.6.Partisipasi..... 41

2.7.Kerangka Berfikir 55

2.8.Hipotesis Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1.Metode Penelitian	59
3.2.Jenis dan Sumber Data	60
3.3.Instrumen Penelitian	63
3.4.Populasi dan Sampel Penelitian.....	68
3.5.Teknik Pengolahan dan Analisis Data	71
3.6.Lokasi dan Jadwal Penelitian	73
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	75
4.1.Deskripsi Obyekpenelitian	75
4.1.1. Letak Geografis Kecamatan Baros	75
4.1.2. Keadaan Penduduk.....	75
4.2.Karakteristik Responden	81
4.3.Analisis Data	84
4.3.1. Uji Validitas Instrumen.....	84
4.3.2. Uji Reabilitas Instrumen	86
4.3.3. Deskripsi Data	87
4.4.Pengujian Hipotesis	125
4.5.Interpertasi Hasil Penelitian.....	127
4.6.Pembahasan.....	131
BAB V PENUTUP	140
5.1 Kesimpulan	140
5.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tingkat APK Kecamatan Baros Tahun 2010.....	8
Tabel 3.1. Skorsing Item Instrumen.....	64
Tabel 3.2. Instrumen Penelitian	65
Tabel 3.4. Perhitungan Sampel	70
Tabel 3.5. Jadwal Penelitian.....	74
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pertanyaan).....	85
Tabel 4.2. Tabel Reliabilitas	87
Tabel 4.3. Analisis Hipotesis Penelitian	128
Tabel 4.4. Analisis Hipotesis Penelitian	136

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Diagram 4.2. Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur	81
Diagram 4.3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	82
Diagram 4.4. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	83
Diagram 4.5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	84
Diagram 4.6. Jawaban Kuesioner No. 1	88
Diagram 4.7. Jawaban Kuesioner No. 2	90
Diagram 4.8. Jawaban Kuesioner No. 3	92
Diagram 4.9. Jawaban Kuesioner No. 4	94
Diagram 4.10. Jawaban Kuesioner No. 5	96
Diagram 4.11. Jawaban Kuesioner No. 6	97
Diagram 4.12. Jawaban Kuesioner No. 7	99
Diagram 4.13. Jawaban Kuesioner No. 8	100
Diagram 4.14. Jawaban Kuesioner No. 9	101
Diagram 4.15. Jawaban Kuesioner No. 10	102
Diagram 4.16. Jawaban Kuesioner No. 11	103
Diagram 4.17. Jawaban Kuesioner No. 12	104
Diagram 4.18. Jawaban Kuesioner No. 13	105
Diagram 4.19. Jawaban Kuesioner No. 14	106
Diagram 4.20. Jawaban Kuesioner No. 15	107
Diagram 4.21. Jawaban Kuesioner No. 16	109
Diagram 4.22. Jawaban Kuesioner No. 17	110

Diagram 4.23. Jawaban Kuesioner No. 18	112
Diagram 4.24. Jawaban Kuesioner No. 19	113
Diagram 4.25. Jawaban Kuesioner No. 20	114
Diagram 4.26. Jawaban Kuesioner No. 21	116
Diagram 4.27. Jawaban Kuesioner No. 22	117
Diagram 4.28. Jawaban Kuesioner No. 23	119
Diagram 4.29. Jawaban Kuesioner No.24	120
Diagram 4.30. Jawaban Kuesioner No. 25	121
Diagram 4.31. Jawaban Kuesioner No. 26	122
Diagram 4.32. Jawaban Kuesioner No. 27	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....	
Lampiran 2. Kuesioner.....	
Lampiran 3. Surat Ijin Permohonan Data Ke BPS.....	
Lampiran 4. Surat Ijin Permohonan Data Ke UPTD Pendidikan Kec. Baros.....	
Lampiran 5. Tabulasi Data Primer (Identitas Responden).....	
Lampiran 6. Jawaban Responden.....	
Lampiran 7. Item Total Statistic	
Lampiran 8. Case Processing Sumery	
Lampiran 9. Frequency Table	
Lampiran 10.Struktur Organisasi Kecamatan Baros.....	
Lampiran 11>Nama Desa Beserta Nama Kepala Desa di Kecamatan Baros	
Lampiran 12>Nama Desa, Sekolah dan Jumlah Murid di Kecamatan Baros	
Lampiran 13.Jumlah Peserta Didik Tingkat SD, SLTP dan SMA	
Lampiran 12>Nama Desa, Sekolah dan Jumlah Murid di Kecamatan Baros	
Lampiran 13.Jumlah Peserta Didik Tingkat SD, SLTP dan SMA	
Lampiran 14. Perhitungan Rumus Alpha Cronbach (Uji T)	
Lampiran 15.Nilai – Nilai dalam Distribusi t	
Lampiran 16. Tabel Nilai – Nilai r Product Moment	
Lampiran 17.Daftar Bimbingan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Faktor terpenting yang menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah melimpahnya kekayaan alam melainkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang baik (berkualitas) akan di peroleh dari pendidikan yang baik yang menuju sampai kependidikan yang stinggi-tinggi nya bagi mereka penduduk didalam suatu negara, karena semakin tinggi pendidikan seorang akan semaki luas pengetahuannya, baik dalam ilmu yang dia dapatkan dari bangku sekolah ataupun ilmu yang didapat dari pengalaman-pengalaman yang ia peroleh dari lingkungan luar sekolah, dengan kemampuannya itu lah dia mampu mewujudkan cita-cita, baik cita-citanya maupun cita-cita bangsa dan Negara.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi suatu Bangsa akan sanggup belajar dari kenyataan yang serba dinamis, sanggup mencari jalan alternatif pemecahan masalah, serta sanggup mengembangkan pola-pola pemikiran yang pada akhirnya akan dapat melahirkan strategis persaingan unggul di era global. semua itu bisa tercapai melalui pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta semua aspek yang berkaitan dengan kependidikan. Peneliti dalam hal ini mencoba menguraikan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajarana agar dimana seseorang mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya (yang dimilikinya) dalam bidang

apapun baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi kepribadian yang dimilikinya.

Pendidikan yang didefinisikan oleh UU NO 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Perlu kita ketahui bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sampai kapanpun akan diperlukan oleh siapapun dalam menjalani kehidupannya baik secara individu maupun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, untuk itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama kita semua dalam meningkatkannya menuju pembangunan Indonesia yang lebih maju lagi, baik pemerintah, masyarakat serta lembaga terkait dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang unggul serta mampu bersaing untuk memajukan suatu bangsa dan negara Indonesia dengan negara lain, karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara yaitu dilihat dari kualitas pendidikannya. orang yakin bahwa dengan pendidikan umat manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. *Suyanto (1993:9)* memandang pendidikan sebagai sarana intervensi kehidupan dan agen pembaharu. Sedangkan *Dedi Supriadi (1993:7)*, meyakini sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, baik vertikal maupun horizontal.

Landasan pokok keberadaan Sistem Pendidikan Nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dapat diartikan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap Warga Negara tanpa adanya pembedaan diantara satu sama lainnya, dengan demikian dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab *Arifin (2003:29)*.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan *indirect investment* bagi proses produksi dan *direct investment* bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human*

quality). Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang bermutu.

Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Program wajib belajar sembilan tahun ini dicanangkan pada tahun 1994 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar enam tahun. Sejak tahun 1984, tepatnya pada masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto pendidikan wajib belajar sembilan tahun sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Sebab, akses ekonomi masyarakat Indonesia belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan secara komplit. Padahal bagi bangsa Indonesia pendidikan sesungguhnya adalah komitmen antara Pemerintah dan Masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Pada batang tubuh pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan“(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan bahwa setiap warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan zaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan

biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju.

Pendidikan wajib belajar sembilan tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konseptual, dalam dan luar tanpa pemisah serta merupakan satu satuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konseptual yang menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah, masing-masing dengan kelompok belajar kelas I sampai dengan Kelas VI untuk SD dan Kelas I sampai Kelas III untuk SLTP *Hadari Nawawi (1994:351)*.

Upaya untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusiannya, pemerintah telah berusaha dengan mengeluarkan program – program yang berkaitan dengan pendidikan serta program penunjang demi tercapainya kualitas sumber daya manusia atau kualitas pendidikan yang di harapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara lain dalam segala bidang. Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung program yang telah di canangkan oleh pemerintah, hendaknya masyarakat ikut membantu dan berpartisipasi langsung dalam mensukseskan program tersebut, karena mustahil suatu pekerjaan akan berhasil apabila hanya di jalankan oleh satu pihak saja sedangkan pihak yang lain hanya diam dan melihat tanpa ikut serta di dalamnya. Masyarakat merupakan element terpenting dalam suatu negara.

Apabila masyarakatnya terpuruk dalam kebodohan maka negara tersebut akan terpuruk dan tidak bisa dikatakan Negara itu maju dikarenakan kondisi masyarakatnya yang masih rendah, begitu pun sebaliknya.

Mengingat akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seharusnya kita sebagai masyarakat yang bernegara harus memajukan pendidikan Indonesia khususnya dalam hal ini pendidikan yang berada di Kecamatan Baros. Kecamatan Baros merupakan suatu wilayah otonom yang berada di bawah pemerintahan daerah Kabupaten Serang, Kecamatan Baros yang terdiri dari 14 Desa yang jumlah Penduduk-nya mencapai 53.043 **(Kecamatan Baros: 2011)**

Seperti halnya telah kita ketahui diatas suatu Negara bisa dikatakan maju apabila sumber daya manusia maju/berkualitas. untuk menjadikan Masyarakat yang berkualitas maka perlu di tunjang dengan pendidikan yang berkualitas, seperti halnya Negara begitu pun pemerintah daerah, suatu daerah bisa dikatakan maju apabila pola pikir masyarakatnya sudah maju. Kemajuan suatu Negara ditunjang dengan kemajuan daerah-daerah yang berada di Negara tersebut. Untuk itu apabila pembangunan pendidikan di Kecamatan Baros ingin dikatakan maju harus di tunjang dengan masyarakat Baros yang berkualitas dari segi pendidikannya

Dari hasil observasi penelitian setelah penelitian berkeliling mamantau kehidupan Masyarakat Baros melakukan wawancara bahwa Kecamatan Baros masih tergolong kedalam wilayah yang masih tertinggal. Meskipun teknologi informasi sudah masuk kewilayah Baros dan mudah ditemukan di sepanjang jalan

dari Jl. Serang menuju Pandeglang dalam hal ini banyaknya Warung Internet (Warnet). Tetapi Peneliti menganggap itu semua tidak bisa dikatakan Kecamatan Baros sudah termasuk kedalam golongan daerah yang maju. Karena masih rendahnya pendidikan di Kecamatan Baros dan masih kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pendidikan sehingga teknologi yang masuk ke Kecamatan Baros tidak bisa digunakan dengan maksimal oleh masyarakat setempat, terbukti peneliti menemukan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih rendah yang tidak melebihi 70 %. Terdapatnya Desa tertinggal atau Desa yang Masyarakatnya miskin atau bisa dikatakan yang sebagian besar penduduknya dalam keadaan ekonomi yang lemah.

Pendidikan yang masih rendah di Baros bisa dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Baros masih rendah yaitu untuk tingkat SD/MI sederajat hanya mencapai 60.09% sedangkan untuk pendidikan tingkat SMP/MTS sederajat hanya mencapai 44.54 %, yang secara keseluruhan baru mencapai 52,31% untuk program wajib belajar Sembilan tahun di Kecamatan Baros. APK merupakan salah satu indikator suatu pendidikan berhasil atau tidak. Apabila APK tersebut masih rendah maka kualitas pendidikan yang ada masih rendah pula, apabila APK nya besar maka kualitas pendidikan nya sudah baik. menurut peneliti karena masih jauh dari apa yang diharapkan pemerintah yaitu 100%

Tabel 1.1

**Tabel Tingkat APK (Angka Partisipasi Kasar)
Kecamatan tahun 2010**

Jenjang Sekolah	Jumlah Siswa			Jumlah Penduduk Usia Sekolah	APK
	Swasta	Negri	Jumlah (X)	(Y)	(X/Y)/100
SD/MI	836	7630	8466	14090	60.09
SMP/MTS	1107	1771	2878	6462	44.54

Sumber BPS 2010

Tabel diatas memperlihatkan bahwasannya di Kecamatan Baros masih sangat kecil tingkat Angka Partisipasi Kasar yang dibandingkan APK dari Provisi Banten yang di peroleh menurut BPS tahun 2010 yang mana SD/MI sederajat mencapai 94,37 %, tingkat SMP/MTS sederajat mencapai 45.06 % (*BPS: Banten dalam Angka 2010*), dari data tersebut jenjang pendidikan di Baros masih tergolong rendah apabila dilihat dari hasil APK se Provinsi Banten.

Menindak lanjuti hal diatas Keterlibatan Masyarakat Baros dalam pendidikan merupakan suatu harapan besar bagi Masyarakat Baros, “orang mana yang tak ingin maju, tidak ada orang yang ingin bodoh” itulah mungkin selogan yang perlu kita perhatikan. Setiap orang pasti menginginkan dirinya untuk menjadi lebih baik dari orang lain, karena beberapa hal/ faktor tertentu semua harapan itu bisa musnah begitu saja adapun factor tersebut karena latar belakang keluarga yang miskin, pola pikir orang tua yang kolot, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat. Atau karena faktor yang lainnya, untuk itu Peneliti ingin mencari tahu sejauh mana harapan masyarakat Baros bisa di wujudkan, dan sejauh mana tingkat partisi pasi masyarakat dalam pendidikan

yang ada di Baros yang disertai dengan partisipasi masyarakatnya dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Untuk menindak lanjuti program pemerintah mengenai wajib belajar Sembilan tahun yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya, yang mampu menghilangkan kebodohan sehingga dapat memajukan Negara. Program ini kurang lebih sudah berjalan selama hampir 17 tahun, dari beberapa sumber yang saya baca melihat Banyak sekali yang mengemukakan bahwasanya program wajib belajar 9 tahun di Indonesia ini banyak yang mengatakan berhasil, tetapi saya melihat pendidikan di Indonesia masih dibidang perlu perbaikan yang besar, sebagai suatu pedoman khususnya di Kecamatan Baros sekarang ini dari kualitas pendidikan nya masih dikatakan sangat rendah jika melihat APK nya, masih banyak orang yang menganggur, masih banyak warga masyarakat Kecamatan Baros dalam keadaan miskin (seperti di kampung kadu hileud, kp. Sobong, kp padurung, serta masih banyak lagi) sehingga anaknya tidak mampu sekolah meskipun pemerintah telah mensubsidi dengan BOS (Biaya Operasional Sekolah) salah satu program yang mendukung wajib belajar Sembilan tahun, yang orang menganggap biaya untuk sekolah tingkat SD sederajat dan SLTP sederajat gratis.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan dan melakukan wawancara kepada beberapa penduduk di tempat yang berbeda ternyata beberapa daerah di Kecamatan Baros banyak masyarakat yang merasa untuk menyekolahkan anaknya masih perlu mengeluarkan uang lagi (tepatnya di daerah Kp. basengir dan Kp. Sobong) , jadi untuk menyekolahkan anaknya perlu

pikir-pikir lagi, karena dibandingkan sekolah mereka lebih mementingkan kebutuhan kehidupan sehari-hari dulu. Selain itu karena pemikiran mereka yang kolot, serta mereka lebih memilih untuk menyuruh ke pondok pesantren karena selain tidak mengeluarkan biaya yang mahal, ilmunya bisa bermanfaat di akhirat kelak. Masyarakat miskin mengharapkan sepenuhnya biaya sekolah digratiskan agar anak-anak mereka bisa bersekolah.

Peneliti disini menyajikan contoh dari hasil obesrvasi langsung ke Kampung tersebut yang mana daerah ini benar adanya di Kecamatan Baros yang memperlihatkan bahwa program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 1994 itu masih belum berhasil sepenuhnya. hanya sebagian contoh kecil saja di satu Kampung di Kecamatan Baros tepatnya di Kampung Basengir Desa Tejamari seluruh masyarakatnya yang berusia wajib sekolah SD Sederajat (7-12 tahun) dan masyarakat yang memiliki usia wajib sekolah SMP sederajat (antara 12-15 tahun) sebagian besar tidak melanjutkan pendidikan sekolah ke tingkat SMP sekitar 90% dari seluruh warga daerah tersebut. Dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai sekolah.

Selain alasan ekonomi faktor lingkungan juga turut mempengaruhi, dan pola pikir orang tua yang kolot/ factor sosial budaya masyarakat setempat yang menganggap pendidikan formal tidak lah penting. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat, karena tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka dan bagi kemajuan bangsa kepada masyarakat, sehingga kampung tersebut banyak menghasilkan pengangguran (dalam ha ini hanya bekerja sebagai buruh

tani dan tukang ojek serta perempuannya banyak yang menjadi pembantu rumah tangga) yang pada akhirnya menimbulkan masyarakat yang suka mencuri, banyak yang menikah di usia yang masih muda serta sebagian besar remaja yang seharusnya menikmati hidupnya di bangku sekolah.

Maka dari dasar diatas Peneliti ingin menjawab pertanyaan tersebut, apakah benar wajib belajar sembilan tahun sudah berhasil atau tidak. Selain hal tersebut peneliti ingin meneliti sejauh mana keikutsertaan masyarakat (partisipasi masyarakat) dalam mensukseskan program tersebut. Agar apa yang menjadi pertanyaan selama ini di dalam hati peneliti maupun masyarakat lainnya bisa mendapatkan jawabannya, yang akan kita ketahui dari hasil penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Masih terdapat di daerah Kecamatan Baros dalam 1 kampung (kKp. Baesngir Desa Tejamari)nyang sebagian besar penduduknya yang berusia 12-15 tahun tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP/SLTP sederajat.
2. Keadaan ekonomi masyarakat yang masih rendah, sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya
3. Biaya pendidikan yang dianggap gratis, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat miskin.

4. Kurangnya perhatian kepala daerah setempat untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
5. Pandangan orang tua yang kolot, yang menganggap pendidikan formal tidak penting, lebih penting pendidikan agama.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang di uraikan diatas maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada tingkat “Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang”.

1.3. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin peneliti ketahui yaitu: Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan didalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar Sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis :

1. Mempertajam dan mengembangkan teori yang ada di dunia akademis.
2. Untuk mengaplikasikan teori partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupten Serang.
3. Untuk mengembangkan teori partisipasi masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis :

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun. Terutama untu masyarakat Baros serta kepala daerah yang ada di Kecamatan Baros serta satuan lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Baros

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian yang masing-masing terdiri dari sub bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah menjadi dasar penelitian kemudian identifikasi masalah dan pembatasan masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari deskripsi teori, kerangka berfikir serta hipotesis. dalam deskripsi teori akan di jelaskan tentang pendapat para ahli mengenai teori yang berkaitan dengan teori partisipasi masyarakat dalam mensukseskan programwajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros. Selanjutnya kerangka berfikir akan di gambarkan alur pemikiran analisis dalam penelitian ini. Serta hipotesis yang di buat yang akan menggambarkan pemikiran sementara mengenai partisipasi masyarakat dalam mensukseskan programwajib belajar di kecamatan baros yang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan serta data primer dari wawancara yang dilakukan dari masyarakat sekitar.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan di gunakan, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data, serta dijelaskan teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam Bab IV ini akan dijabarkan mengenai deskripsi objektif penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan sebelumnya, serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Mendeskripsikan data yaitu menjelaskan data yang telah diolah dari data yang masih mentah dengan menggunakan teknik analisa data yang relevan baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Interpretasi hasil penelitian dengan cara mengaitkan dengan rumusan masalah, pembahasan yaitu melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab V ini memuat penjelasan mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Deskripsi Teori

Pada bagian ini deskripsi teori ini digunakan untuk memberikan gambaran konsep yang terkait dengan penelitian serta digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk itu perlu membedah kembali tentang konsep program wajib belajar Sembilan tahun, kebijakan publik yang berkaitan dengan wajib belajar Sembilan tahun, konsep pemberdayaan sumber daya manusia serta partisipasi dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Baru setelah itu membedah tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Definisi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik *Harbani(2010: 38)*.

Dalam arti yang luas kebijakan (*policy*) mempunyai dua aspek pokok antara lain:

1. *Policy* merupakan praktek sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah

berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.

2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif
Miftah(2008: 106-107).

2.2.2. Kebijakan Publik

Menurut *Chandler dan Plano* dala Harbani (2010:38-39). Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan *Chandler dan Plano* beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sedangkan menurut *William N. Dunn* (1994) dalam *Harbani (2010:39)*, mengatakan sebagai berikut:

bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, energi

kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

Pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh *Thomas R. Dye* (1981),

kebijakan publik bahwasannya ialah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. *Dye* mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (*objektifnya*) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis *Chaizi Nasucha* dalam *Harbani (2010: 39)*.

Dari berbagai uraian diatas, kebijakan publik dapat dikatakan bahwa

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik

2.2.3. Jenis – Jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan publik dapat di telusuri melalui undang undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7

menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah
 Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Menurut *Nugroho (2006:31)* kebijakan publik di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Kebijakan makro yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut diatas.
2. Kebijakan meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
3. Kebijakan mikro yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri , Gubernur, Bupati dan Wali Kota Harbani (2010: 40).

Sedangkan menurut *Adreson dalam Harbani (2010:40)* mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan yaitu:

1. *Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural.*
 Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.
2. *Kebijakan distribtif vs kebijakan regulator vs kebijakan re distributif.*
 Kebijakan distribtif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatna kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulator adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Sedangkan kebijakan re-re distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. *Kebijakan material vs kebijakan simbolis*
 Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).
 Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan

kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas (Harbani: 2010).

Partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar Sembilan tahun. Dalam hal ini mpeneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program yang di keluarkan oleh pemerintah, program tersebut merupakan salah satu kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, untuk itu peneliti menggunakan teori kebijakan dalam mendukung proses penelitian ini.

2.3.Pendidikan

2.3.1. Filosofi pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang hakiki bagi setiap manusia. Sebuah pepata yang populer di tengah msyarakat Indonesia menyatakan “ manusia belajar sejak lahir sampai ke liang kubur ” , ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dan terus berproses sejak manusia hadir di dunia sampai akhir hayatnya.

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Untuk Indonesia pendidikan diharapkan mengusahakan (i) pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan (ii) pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pendidikan adalah suatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini *Tirtarahardja (2005:81-82)*.

2.3.2. Pengertian Pendidikan

Secara sempit definisi Pendidikan adalah sekolah (pengajaran yang di selenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal, segala pengaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka). Arti yang sederhana tentang pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina keperibadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Langeveld dalam Hasbullah(2005: 2) pendidikan ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang di berikan kepada anak bertujuan kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Sedangkan menurut J.j. rousseau dalam Hasbullah (2005:2) pendidikan memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

2.3.2.1. Definisi berdasarkan fungsi, Tirtarahadja (2005:33-37)

1. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu 1) nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. 2) nilai yang kurang cocok diperbaiki misalnya tata cara pesta perkawinan dan 3) yang tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal

2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada

terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.

3. **Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara**

Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik.

4. **Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja**

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

5. **Definisi Pendidikan Menurut GBHN**

GBHN 1988(BP 7 pusat, 1990: 105) memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

2.3.2.2. Definisi Berdasarkan Pendekatan Ilmiah, (*Tirtarahardja:2005*)

1. Pendidikan adalah sosialisasi; suatu proses membantu generasi muda agar menjadi anggota masyarakat yang diharapkan (sosiologi).
2. Pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan; suatu proses dengan jalan mana seseorang menyesuaikan diri kepada suatu kultur masyarakat dan mengasimilasikan nilai-nilainya (antropologi).
3. Pendidikan sebagai human investment (ekonomi).
4. Pendidikan sebagai proses civilisasi; suatu upaya menyiapkan warga Negara yang sesuai dengan aspirasi bangsa dan negaranya (politik).
5. Pendidikan berarti proses adaptasi, proses penyesuaian diri yang terbaik dari seseorang manusia yang sadar terhadap lingkungannya (biologi).
6. Pendidikan identik dengan personalisasi; upaya membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai perkembangan optimal menjadi diri sendiri (psikologi).
7. Pendidikan ialah pendewasaan; suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan (pedagogik).

2.3.3. Tujuan dan Proses Pendidikan

2.3.3.1. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan *Tirtarahardja (2005: 37)*.

2.3.3.2. Proses Pendidikan

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya, pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal *Tirtarahardja (2005: 40-41)*.

2.3.4. Unsur - Unsur Pendidikan

Tirtarahadja (2005:51) Proses pendidikan melibatkan banyak hal atau

unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan yaitu:

- a) Subjek yang dibimbing (peserta didik)
- b) Orang yang membimbing (pendidik/ guru)
- c) Interaksi antara peserta didik dan pendidik (interaksi edukatif)
- d) Ke arah mana bimbingan ditunjukkan (tujuan pendidikan)
- e) Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan)

2.3.5. System Pendidikan Nasional

Maksud system pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 bahwa Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam UU No 20 Th 2003 pasal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 fungsi Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2.4. Wajib belajar Sembilan Tahun

2.4.1. Landasan Hukum dan Sejarah di Adakannya Wajib Belajar 9 Tahun

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat . UU RI No. 2 tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar.. kemudian PP no 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun , terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP Tirtarahardja (2005:255)

dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahun terkecuali pendidikan wajib belajar.

Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketentuan GBHN 1993 tentang arah pendidikan nasional butir 26 yang antara lain mengatakan perlunya peningkatan kualitas pemerataan pendidikan, terutama peningkatan kualitas pendidikan dasar Tirtarahardja (2005:255)

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berikut:

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.4.2. Latar Belakang Pencanaan Wajib Belajar 9 Tahun

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaitu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dan sudut pandang kepentingan ekonorm', pendidikan, dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat member, nilal tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan

ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, ditnungkinkar. Bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (diversified).

3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.
5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu engetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan

hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

2.4.3. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Upaya pembangunan yang dilakukan, dengan berbagai bentuk dan variasinya pada dasarnya dilakukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, ataupun kesejahteraan sosial. *Spicker* (1995:3) menggambarkan sekurang-kurangnya ada lima aspek utama yang harus diperhatikan, kelima aspek ini dikenal dengan big five yaitu :

1. Kesehatan
2. Pendidikan perumahan
3. Jaminan sosial
4. Pekerjaan sosial.
5. Jaminan sosial

Setelah menyadari betapa besar dan penting peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, lantas pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan Program Wajib Belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis, dan berhitung.

Pada awal penancangan wajib belajar tersebut, Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain:

1. penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD),
2. penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan
3. pendidikan untuk semua (*educational for all*).

2.4.4. Tujuan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh *The International Development Research Center*, meliputi:

1. kemampuan berkomunikasi;
2. kemampuan dasar berhitung;
3. pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah;
4. pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan
5. kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio.

Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), juga sejalan dengan Piagam **PBB** tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak.

Menurut May, wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan

namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif).

Sisi pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat,
2. Setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki,
3. Setiap warga negara mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan
4. Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

2.4.5. Pendekatan dalam Melaksanakan Wajib Belajar Sembilan Tahun

Dalam melaksanakan wajib belajar sembilan tahun, ada beberapa pendekatan yang dilakukan sebagai strategi pelaksanaannya, antara lain:

- a. Pendekatan Budaya:** Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan

pelaksanaan sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum.

- b. Pendekatan Sosial:** Sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B.
- c. Pendekatan Agama:** Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu.
- d. Pendekatan Birokrasi:** Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain.

- e. **Pendekatan Hukum:** Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “*universal basic education*” dan belum menerapkan konsep “*compulsary education*”. Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “*compulsary education*”, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik.

2.4.6. Program Pendukung Percepatan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka

pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.

6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Bantuan operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB dan pondok Pesantren Salafiyah setara SD, SMP/MTs/SMPLB dan Pondok Pesantren Salafiyah setara SMP penyelenggara wajib Belajar Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Pemerintah memberikan BOS langsung ke sekolah, madrasah dan pondok pesantren Salafiyah setara pendidikan dasar guna membantu kegiatan proses pembelajaran dan pembiayaan pendidikan siswa untuk Buku pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan sekolah, biaya ujian baik itu ulangan

umum bersama maupun ulangan umum harian, biaya honor guru, dan transportasi siswa kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- a. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
- b. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
- c. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
- d. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun

2.5. Pemberdayaan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. *Shardlow (1993:32)* bahwa melihat berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Kesimpulannya *Shardlow* menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidak lah jauh berbeda dengan gagasan biestek (1961) yang dikenal

di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama “*self-Determination*”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

2.5.1. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Suatu Program dan Proses

Disamping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.

Untuk melihat itu semua dikemukakan oleh *Hogan* (2003:13) yang mengutip dari pandangan *Rotter* (1966), *Selignan* (1975), *Hopson* dan *Sally* (1995) yang melihat:

proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja. Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

2.5.2. Peran Pelaku Perubahan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Peran pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat yang berkaitan dengan peran pelaku perubahan dalam *diskrus komunitas*. Dalam *diskrus* ini, pelaku perubahan memainkan peran sebagai *community worker* ataupun *Enabler* (*Ife*,1997:53). Sebagai *community worker*. *Ife* melihat sekurang-kurangnya ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah

pada teknik dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki seorang *community worker* sebagai pemberdaya masyarakat.

Keempat peran dan keterampilan tersebut adalah:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (*fasilitative roles and skill*)
2. Peran dan keterampilan education (*educational roles and skill*)
3. Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skill*)
4. Peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skill*)

Peran fasilitatif dan peran edukasional merupakan peran-peran yang lebih mendasar dan langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat maupun intervensi komunitas (perubahan sosial terencana pada level komunitas) kedua peran yang lainnya bukan berarti tidak penting, tapi peran-peran tersebut lebih bersifat kurang langsung ke komunitas sasaran bila dibandingkan kedua peran yang lainnya (yaitu peran fasilitatif dan peran educational).

1. Peran fasilitatif (*fasilitative roles and skill*)

Menurut *Ife* (2002:203-275) peran ini terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan dan mengorganisasi

1) Animasi Sosial (*Social Animation*)

Menurut *ife* (2002:231), keterampilan melakukan animasi sosial menggambarkan kemampuan pelaku perubahan ataupun pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energy, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk didalamnya mengaktifkan, menstimulus, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak. Peran pelaku perubahan disini bukanlah sebagai seseorang yang akan melaksanakan seluruh kegiatan oleh dirinya sendiri, tetapi lebih kearah membekali (*enable*) warga untuk mau terlibat aktif dalam proses perubahan di komunitas tersebut.

2) Mediasi dan Negosiasi (*Mediation and Negotiation*)

Seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut. Peran sebagai mediator ini tentu saja terkait dengan peran sebagai negosiator karena ditengah kelompok yang sedang berkonflik, tidak jarang seorang pelaku perubahan harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih mendalam.

3) Pemberi Dukungan (*Support*)

Ife (2002:234) melihat bahwa salah satu peran dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan tidak selalu bersifat ekstrinsik ataupun materil, tetapi dapat juga bersifat intrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan warga, seperti menyediakan waktu bagi warga bila mereka ingin berbicara dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.

4) Membentuk Konsensus (*Building Consensus*)

Membentuk konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi yang melibatkan penekanan terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasi landasan dasar yang sama dari berbagai pihak dalam masyarakat, dan membantu warga untuk bergerak kearah pencapaian konsensus. Hal yang penting dalam pembentukan konsensus ini adalah tercapainya suatu kesepakatan (*consensus*) tidak berarti bahwa semua orang (warga masyarakat) harus setuju, apalagi dalam kasus ini dimana terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Pencapaian konsensus adalah kesepakatan melakukan suatu tindakan tertentu untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat tersebut sehingga tercapai rasa menghargai keragaman budaya dan pandangan yang ada, dalam upaya mencari jalan terbaik untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat.

5) Fasilitasi Kelompok (*Group Facilitation*)

Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu modal sosial karena adanya unsur norma (*norms*) dan nilai (*value*) dalam kelompok tersebut serta adanya unsur responsitas (*reciprocity*) dan kepercayaan (*trust*) yang merupakan suatu ciri modal sosial (*social capital*).

Dalam mengembangkan kelompok hal yang harus dilakukan terkait peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yaitu: *pertama* memfokuskan pada membantu kelompok untuk mencapai

hasil yang diinginkan. Sedangkan hal yang *kedua* lebih mengarah kepada bagaimana menciptakan kelompok tersebut; dan bagaimana agar warga mau berpartisipasi dalam kelompok tersebut; dan bagaimana perasaan mereka setelah bergabung dengan kelompok tersebut.

6) Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan (*Utilization of Skill and Resources*)

Hal lain yang penting menurut *Ife* (2002:238), adalah pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat harus adapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok.

7) Mengorganisasi (*Organizing*)

Keterampilan mengorganisasikan melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan; hal mana yang tidak perlu dilakukan sendiri; dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan.

2. Peran Edukational (*Technical Roles and Skill*)

Peran edukasional meliputi empat peran, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan, dan pelatihan.

1) Membangkitkan kesadaran Masyarakat (*Consciousness Raising*)

Ife (2002:243-243) menyatakan bahwa upaya membangkitkan kesadaran masyarakat (*consciousness raising*) berawal dari upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih mikro (seperti struktur sosial dan politik). Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari persepektif sosial politik yang lebih luas.

Penyadaran masyarakat, selain menghubungkan individu dengan struktur sosial dan politik, juga mempunyai dua komponen lainnya. *Pertama* membantu masyarakat untuk dapat melihat berbagai alternatif yang ada. Menurut *Ife* (2002:210) masyarakat tidaklah perlu hanya melihat kehidupan seperti apa adanya saat ini karena dengan mau melihat dunia dari sudut pandang yang lain, seringkali justru dapat memunculkan beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada. dalam hal ini, pelaku perubahan mendorong masyarakat untuk beralih dari kondisi yang ada saat ini.

Yang *kedua* menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial dimana warga dapat berpartisipasi dan bertindak secara efektif (*Ife*,1995:210, 2002:243). Tidak jarang pelaku perubahan hanya berusaha menyadarkan masyarakat akan adanya struktur yang menekan (*oppressive*) sehingga mereka sadar dan tidak

mau mendukung struktur tersebut. Akan tetapi pada dasarnya pelaku perubahan berusaha mengubah dari bersifat menerima secara pasif kearah aktif untuk melakukan perubahan.

Banyak orang bersikap pasif seringkali bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena mereka tidak pernah di perkenalkan pada struktur dan strategi dimana mereka bisa terlibat aktif secara relatif mudah.

2) Menyampaikan informasi (*Informing*)

Pelaku perubahan dalam upaya memberdayakan masyarakat tidak jarang juga harus menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas sasarannya. *Ife* (2002:243) menyatakan bahwa dengan hanya memberikan informasi yang relevan mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi komunitas sasaran tidak jarang dapat menjadi peran yang bermakna terhadap komunitas tersebut. Misalnya, tentang informasi bahaya asap rokok yang dihembuskan kembali oleh peroko aktif terhadap perokok pasif .

3) Mengonfrontasikan (*Confronting*)

Teknik konfrontasi digunakan bila pelaku perubahan telah mempertimbangkan bahwa kalau kondisi yang sekarang terjadi tetap di biarkan, keadaan akan dapat semakin memburuk.

4) Pelatihan (*Training*)

Ife (2002: 245) menyatakan bahwa pelatihan merupakan peran educational yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan pada komunitas sasaran bagaimana cara melakukan suatu hal yang akan berguna bagi mereka secara khusus dan lebih luas lagi adalah bagi komunitasnya.

Pelatihan pada dasarnya akan lebih efektif bila keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan yang diinginkan oleh masyarakat.

2.6. Partisipasi

2.6.1. Pengertian Partisipasi

Kata “partisipasi” secara harifah berarti mengambil bagian dalam suatu kerjasama dalam kaitan dengan pembangunan, hal ini berarti rakyat mau bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan untuk pembangunan.

Partisipasi sebetulnya bukan istilah baru dan juga bukan konsep yang baru bagi masyarakat Indonesia. Konsep partisipasi telah lama dipraktekan oleh berbagai suku dan kebudayaan di Indonesia. Yang dimaksud dengan konsep partisipasi sebenarnya adalah “keikutsertaan” atau keterlibatan masyarakat, sehingga sebetulnya partisipasi tersebut sudah umumdilakukan oleh masyarakat, akan tetapi munculnya dalam bentuk-bentuk yang berbeda dari satu masyarakat

dengan masyarakat lainnya seperti rembug desa, kerapatan adat dan sebagainya modul pelatihan (2001: 119).

Menurut Bintoro partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Dalam suatu hubungan atau interaksi sosial, keterlibatan berbagai pihak dalam proses mengambil keputusan maupun pelaksanaan program merupakan hal yang harus dilakukan. Dikarenakan melalui partisipasi inilah keterlibatan masyarakat dapat terwujud dan keberlangsungan program akan terjamin. Keterlibatan masyarakat dapat menumbuhkan keyakinan kolektif sebagai suatu yang dapat mendorong keberhasilan program.

) Partisipasi dapat dirumuskan sebagai *mental and emotional involvement of a person in a group situations that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for them. Atau sebagai the involvement of a significant number of persons in situations or actions which enhance their well-being, eg. Their income, security, or self esteem* Norman dalam Kaho (2005:126)

Yang berarti partisipasi merupakan mental dan emosional seseorang yang mendorong mereka untuk terlibat dalam suatu kelompok yang mana mereka dituntut untuk berkontribusi terhadap kelompok serta bertanggung jawab dan berbagi untuk tercapai tujuan yang ada

Bintoro Tjokroamidjojo dalam Kaho (2005: 127) merumuskan partisipasi seperti:

Pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan, yang kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang;

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
4. Partisipasi dalam evaluasi

Dari teori diatas yang dikemukakan oleh *Bintoro (1988:224-225)* dapat dilihat empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu:

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pemerintah perlu dikembangkan kemampuan masyarakat dan terutama organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan. kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Partisipasi menurut *Mikkelsen (2005:54)* mengutip dari *Chambers (2002)*

melihat istilah partisipasi seringkali digunakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Partisipasi digunakan sebagai label kosmetik (*cosmetic label*). Sebagai label kosmetik kata partisipasi seringkali digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintahan akan mau membiayai proyek tersebut.
2. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengooptasi (*coopting practice*). Dalam hal ini, partisipasi antara lain digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek.
3. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering proses*). dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan (*enable*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.

Menurut dirjen pembangunan masyarakat, Departemen Dalam Negeri

Republik Indonesia, partisipasi meliputi:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata
2. Dijadikan stimulus terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki

3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut, misalnya partisipasi horizontal.
4. Proyek pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat
5. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi rakyat
6. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan

Selain yang dikemukakan beberapa tentang partisipasi, istilah partisipasi dan partisipatoris menurut *Mikkelsen* dalam *Isbandi Rukminto*, biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*participation is the voluntary contribution by people in project, but without their taking part in decision-making*).
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri.

Beberapa pengertian partisipasi di atas menurut *Mikkelsen* kadangkala lebih merupakan kata-kata populer yang sering digunakan dan belum bermakna sebagai partisipasi yang sesungguhnya (*genuine participation*). Partisipasi yang sesungguhnya menurut *Mikkelsen* berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi (*genuine*

participation, initiated and managed by people themselves, is a goal in the democrataic process).

2.6.2. Partisipasi Masyarakat

2.6.2.1. Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dan terpelajar.

Masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Jadi bukan hanya kumpulan dan kerumunan orang dalam waktu sesaat, seperti kerumunan orang di terminal, pasar atau di lapangan sepak bola. dalam kebersamaan yang lama terjadi interaksi sosial. Selanjutnya orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan (Setiadi & Hakam :2008).

Unsur – unsur masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kumpulan orang
2. Sudah terbentuk dengan lama
3. Sudah memiliki system dan struktur sosial sendiri.
4. Memiliki kepercayaan (Nilai), sikap dan perilaku yang dimiliki bersama.
5. Adanya kesinambungan dan pertahanan diri.
6. Memiliki kebudayaan .

Menurut *Robert Maclver* mendefinisikan bahwa:

“Masyarakat adalah suatu sistim hubungan-hubungan yang di tertibkan” (*society means a system of ordered relations*). Sedangkan menurut *Harold J. Laski* dari *London School of Economic and Political Science* maka masyarakat adalah “sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama” (*A society is a group of human being living together and working together for the statisfaction of their mutual wants*). (Budiardjo: 2006)

Menurut *Ralph Linton* mengemukakan bahwa:

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu *Syani, Abdul. (1995:47)*.

Sedangkan menurut *Aguste Comte* dalam *Abdul Syani* bahwa:

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. *Syani, Abdul (1995:56)*.

Dan menurut *Soerjono Soekanto* ciri-ciri masyarakat sebagai berikut (*Syani, Abdul. 1995*):

1. “Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga punya keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-

peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. ”

Secara ringkas dapat disimpulkan kumpulan individu baru dapat disebut sebagai masyarakat jika telah memenuhi tiga syarat utama yaitu:

2. Dalam kumpulan manusia harus ada ikatan perasaan dan kepentingan.
3. Mempunyai tempat tinggal daerah atas daerah yang sama atau mempunyai kesatuan ciri kelompok tertentu
4. Dalam kehidupan bersama itu terdapat aturan-aturan atau hukum yang mengatur perilaku mereka dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Dengan demikian, berarti masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia semata tanpa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu sama lainnya. Setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah individu-individu yang lainnya. Sistem pergaulan didasarkan atas kebiasaan atau lembaga kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.6.2.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat diharapkan timbul jika terdapat kondisi dimana, *Sudadio (2005:35-360)*

1. Ada rasa saling mempercayai antara petugas dan masyarakat
2. Ada ajakan atau kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta sejak awal perencanaan kegiatan

3. Ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat
4. Ada contoh dari pemimpin masyarakat
Kemampuan untuk menciptakan kondisi seperti diatas akan dapat memancing partisipasi masyarakat dan disini di butuhkan kepercayaan untuk bersedia menerima partisipasi mereka itu dan jika potensi mereka dinilai belum memadai untuk berpartisipasi,kita harus bersedia meningkatkan kemampuan mereka.
Dari segi masyarakat sendiri terdapat perbedaan dalam derajat partisipasinya:
 1. Partisipasi atas dasar perintah atau partisipasi pasif
 2. Partisipasi atas dasar kemauan sendiri atau partisipasi aktif, partisipasi ini dapat diwujudkan misalnya dalam bentuk ;
 - a. Mau menyumbangkan ide atau kritik
 - b. Mau mengorganisir lingkungannya
 - c. Mau mengembangkan daya cipta

Sebagai mana yang telah di tuangkan mengenai pengertian dari partisipasi diatas menurut *Mikkelsen* (2005:54) yang ketiga yaitu Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering proses*). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan (*enable*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.

Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. dimana salah satu inti utama dari diskursus komunitas adalah asumsi bahwa: “masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah (instruksi) belaka. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dimaksud pada dasarnya adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi

penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi .

Apabila masyarakat banyak tidak dilibatkan dalam berbagai tahap perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misal pihak lembaga pemerintah ,LSM, maupun sektor swasta) masyarakat cenderung akan menjadi lebih *dependent* (tergantung) pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Kata “partisipasi masyarakat” dalam pembangunan menunjukkan pengertian pada keikutsertaan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan (*united nation:1975*). Dalam kebijakan nasional kenegaraan saat ini, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Menurut Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Departemen dalam Negeri Republik Indonesia dalam buku panduan operasional pembangunan masyarakat desa, antara lain

1. Tenaga dari kalangan masyarakat itu sendiri baik berupa jumlah tenaga, keahlian / keterampilan, manajerial dan lain-lain

2. Dana baik bersumber dari warga masyarakat pada umumnya maupun donator yang berasal dari warga masyarakat
3. Material yang berasal dari masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok
4. Gotong royong dari masyarakat. Moril /pemikiran dari warga masyarakat.
5. Dan lain-lain

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan. Meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dijalankan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (*Rahardjo Adisasmita:2006*)

Menurut *Bintoro (1987:207)* berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. keterlibatan aktif ini juga disebut partisipasi, ada tiga aspek dalam partisipasi, yaitu :

1. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan. dan lain-lain
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan masyarakat tertentu dapat di tingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka, melalui kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Menurut *Ndraha* mengatakan partisipasi sebagai kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang,

tidak dapat di pisahkan, tetapi dapat dan perlu di bedakan. Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.

Selanjutnya *Ndraha* dalam Makmur (2008: 156-157) mengatakan bahwa partisipasi sebagai masukan dan keluaran:

3. Sebagai masukan: partisipasi masyarakat dapat berfungsi menjadi enam fase proses pembangunan yaitu:
 - a. Fase penerimaan informasi
 - b. Fase pemberian tanggapan terhadap informasi
 - c. Fase perencanaan pembangunan
 - d. Fase pelaksanaan pembangunan
 - e. Fase penerimaan kembali hasil pembangunan dan
 - f. Fase penilaian hasil pembangunan.
 Sebagai masukan partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.
4. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakan dan di bangun sebagai keluaran proses stimulus atau motivasi melalui berbagai upaya.

Pentingnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi, alasan atau pertimbangannya adalah anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang masalah dan kepentingan atau kebutuhan mereka:

1. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terajadi dalam masyarakat.
3. Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang di hadapi masyarakat

4. Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM dan Teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan masyarakat.
5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Dalam dunia pendidikan, partisipasi masyarakat merupakan factor yang menentukan keberlangsungan program pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang berwujud fisik maupun non fisik. Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan berbagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan kedua belah pihak. Masyarakat yang dimaksud lebih pada kelompok orang maupun perorangan yang memiliki hubungan maupun kebutuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan lembaga pendidikan *Modul Pelatihan (2001:117-119)*.

2.1.3. Manfaat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Hubungan dunia pendidikan dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat timbal balik (saling memberi dan menerima dan barangkali juga dapat saling memberi keuntungan). Manfaat partisipasi (hubungan) masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut Pidarta dalam *Modul Pelatihan (2001:122)*

Manfaat bagi lembaga pendidikan

1. Memperbesar dorongan untuk mawas diri
2. Mempermudahkan pengelolaan-pengelolaan lembaga
3. Mendapat kritik dan saran dari masyarakat
4. Memudahkan meminta bantuan dan dukungan dari masyarakat
5. Memudahkan menggunakan media pendidikan di masyarakat
6. Memudahkan pemandatan narasumber

Manfaat bagi masyarakat

1. Mengetahui aktivitas lembaga pendidikan dan program-programnya
2. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan lebih mudah diwujudkan
3. Mendapatkan nilai tambah dalam hal inovasi dan kreativitas lembaga
4. Memberikan harapan yang lebih baik terhadap masa depan anak

5. Menyalurkan dukungan
6. Mendorong terciptanya SDM yang berkualitas

Adapun beberapa bentuk partisipasi masyarakat secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Keterlibatan orang tua murid
2. Keterlibatan dewan lembaga pendidikan / dewan pelayanan
3. Keterlibatan jaringan asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat
4. Keterlibatan pemerintah daerah

Modul Pelatihan (2001:123)

2.6.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan prasarana dasar permukiman tingkat keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat setempat. Secara teoritis semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana dasar permukiman maka akan semakin cepat pula pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pembanguana prasarana dasarnya.

Slamet (1994: 97) Faktor- faktor intern yang akan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pencaharian

1) Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini di sebabkan oleh adanya system pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan drajat antara pria dan wanita. Menurut *Soedarno* mengatakan bahwa di dalam system pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memilki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

2) Usia

Faktor usia memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Penemuan menunjukkan bahwa ada hubungan antar usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi.

3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam program penataan lingkungan pemukiman. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi di harapkan akan dapat ikut berperan pada tahap perencanaan sampai tahap pengembangan, sementara penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah akan dapat berperan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan. dengan pendidikan yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, cepat tanggap dan inovatif.

4) Tingkat pendapatan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. *Baross* dalam *Supralan* menyebutkan bahwa banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin kebanyakan melakukan pekerjaan dan tidak berkontribusi uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

5) mata pencaharian

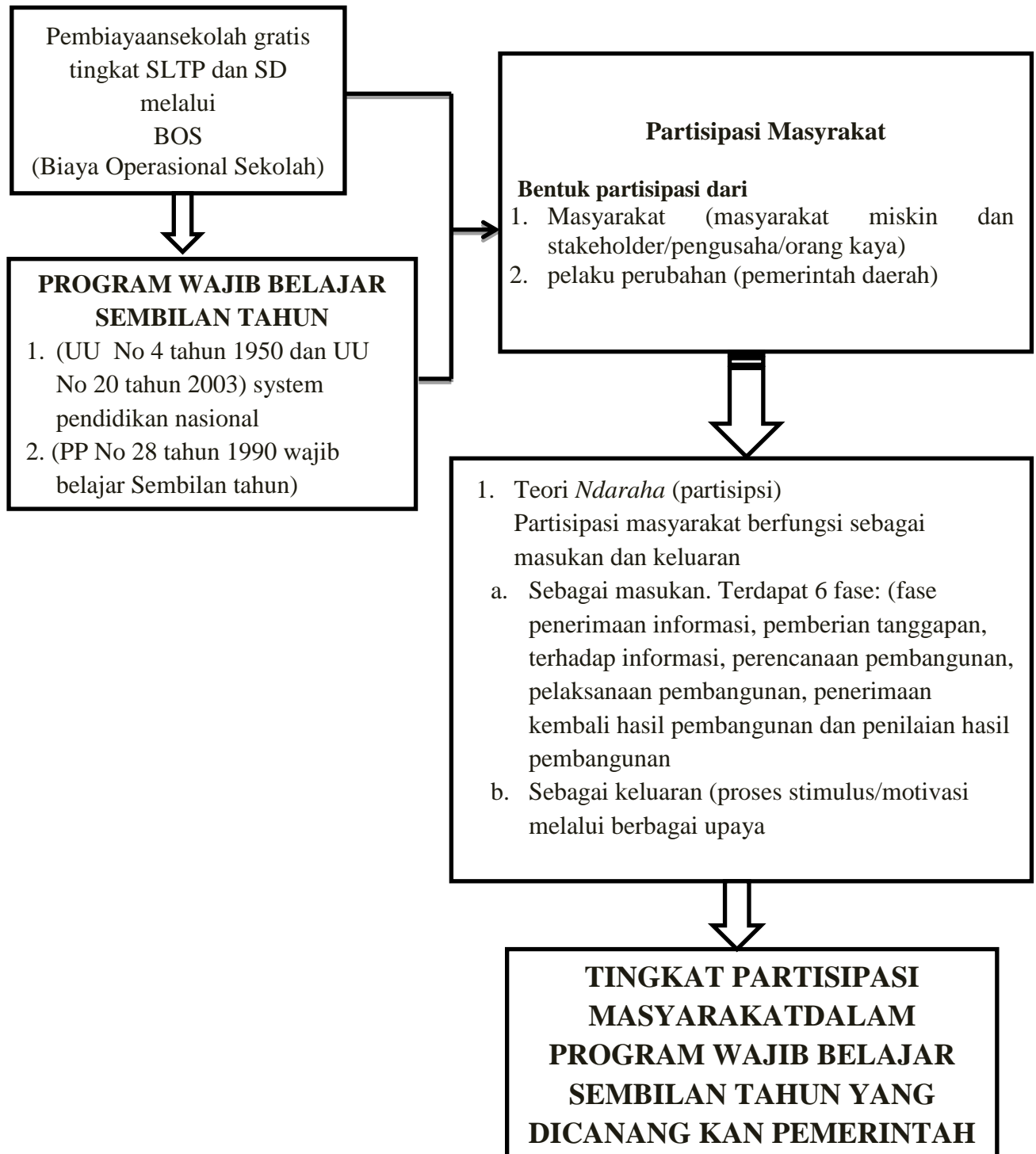
pekerjaan akan berkaitan dengan tingkat penghasilan masyarakat. Jenis pekerjaan atau mata pencaharian akan sangat berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi drajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan. Misalnya dalam hal ini karena waktu kerja yang lama kurangnya perhatian terhadap prestasi anaknya di sekolah

Bentuk partisipasi masyarakat sendiri dapat dikategorikan kedalam bentuk pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, serta barang dan uang. menurut **Whyte** dalam Gunawan (1989: 15), klasifikasi bentuk peran serta yang dikembangkan dalam tahun 1981 adalah sebagai berikut;

- a. konsultasi
- b. sumbangan finansial oleh masyarakat.
- c. Proyek untuk menolong diri sendiri oleh kelompok yang memanfaatkan
- d. Proyek untuk menolong diri sendiri yang melibatkan seluruh masyarakat.
- e. Masyarakat dengan keahlian tertentu.
- f. Aksi massa.

- g. Kesepakatan kolektif untuk merubah lingkungan sekitar.
- h. Endogenous development.
- i. Proyek autonomous community
- j. Pendekatan kebutuhan dengan pemenuhan sendiri.

4.1.Kerangka Berfikir



Penjelasan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya, dalam upaya meningkatkan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusiannya pemerintah mengeluarkan program yaitu Wajib Belajar Sembilan Tahun yang didasarkan pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwasannya seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan (pasal 1) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayaiya (pasal 2). Dengan dikeluarkannya Program wajib belajar sembilan tahun pemerintah berupaya membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. selain UUD 1945 pasal 1 dan 2. Ada juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang no. 12 Tahun 1954. Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pertama diundangkan. Setelah dua kali berubah, sekarang menjadi UU No. 2 Tahun 1989 maupun UU No. 20 Tahun 2003.

Untuk mendukung berjalannya program wajib Sembilan tahun ini pemerintah mengeluarkan program-program pendukung demi ketercapaian wajib belajar Sembilan tahun yang sudah di keluarkan pada tahun 1994 itu, adapun program tersebut yaitu adanya PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Beasiswa Siswa Miskin) dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun

- 2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah
- 3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
- 4) Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- 5) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- 6) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Dengan adanya program wajib belajar Sembilan tahun dan program pendukung yang telah di keluarkan oleh pemerintah, maka masyarakat harus menyambut program tersebut dengan cara ikut berpartisipasi didalamnya, seluruh masyarakat setiap element harus ikut berpartisipasi demi mensukseskan program tersebut bukan hanya masyarakat saja pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut karena tonggak keberhasilan suatu daerah berada di tangan kepala daerahnya masing-masing.

pendekatan teori yang dikemukakan oleh *Ndraha* mengenai partisipasi masyarakat yang mana menurut *Ndraha*. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran). Sebagai masukan. Terdapat 6 fase: (fase penerimaan

informasi, pemberian tanggapan, terhadap informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan penilaian hasil pembangunan. Sedangkan Sebagai keluaran partisi pasi dapat digerakan dan dibangun sebagai proses stimulus atau motivasi melalui berbagai upaya.

4.2.Hipotesis Penelitian

Menurut **Sugiyono** hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Atas dasar kerangka berfikir serta hasil dari observasi yang dilakukan, maka penulis dapat membuat hipotesis sebagai berikut:

Maka peneliti mencoba untuk mengambil suatu hipotesis dalam penelitian ini bahwa “Partisipasi masyarakat baru mencapai ≤ 65 % dalam mensukseskan programwajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros” dengan menggunakan uji satu pihak (*one tail test*).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu usaha pembuktian terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut *Gay* dalam *Umar* , metode deskriptif ini bertujuan menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. (*Umar : 2006*). Penelitian deskriptif digunakan karena variabel dari penelitian ini yang sifatnya mandiri atau satu variabel, dan hasil penelitian ini yang nantinya tidak bermaksud untuk dijadikan bahan perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Sedangkan pendekatan kuantitatif, dipergunakan karena melihat dari tujuan penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dan reliable, sehingga peneliti menganggap

bahwa dengan data yang berbentuk angka-angka yang dapat menguatkan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data langsung dari responden melalui kuesioner (angket, wawancara, dan observasi) atau data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya *Muhamad (2008:103)*.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung didapat oleh penulis, namun melalui perantara orang lain, seperti hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatan-catatan perusahaan atau melalui informan yaitu masyarakat yang memberikan keterangan kepada penulis. Atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi *Muhamad(2008: 105)*

3.2.2. Sumber Data

1. Responden, yaitu Masyarakat Kecamatan Baros yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.
2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Metode Angket

Angket adalah suatu daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran (responden) angket tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yakni pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan setengah terbuka. Dalam penelitian peneliti memilih bentuk angket tertutup sebagai instrumen penelitian dengan pertimbangan keterbatasan penulis dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Alasan lainnya adalah dengan menggunakan angket tertutup, maka responden lebih leluasa menentukan pilihan jawaban yang relatif lebih mudah karena praktis dan efisien waktu.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subyek atau obyek penelitian melalui mata, telinga, dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari obyek yang diteliti dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait didalam penelitian ini. Fakta-fakta dan informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan, kesemuanya dicatat dan dirangkum untuk

dijadikan data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui angket.

3. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan responden untuk mendapatkan gambaran serta informasi yang dibutuhkan sebagai bahan sekunder guna mendukung data primer yang telah peneliti dapatkan sebelumnya melalui angket tertutup.

4. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, gunanya adalah untuk mendapatkan uraian yang benar dari beberapa para ahli, yakni dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, literatur serta karya ilmiah yang pernah dibuat dan dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada hubungan dengan penulisan penelitian ini.

Dari keempat instrumen penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini, metode angket sebagai metode primer, karena data yang diperoleh dari angket merupakan data elementer dalam pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan rumusan statistik untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Sedangkan ketiga metode pengumpulan data lainnya tetap relevan untuk dilakukan guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam kerangka penulisan skripsi ini, agar hasil penelitian dapat mewujudkan adanya

konseptual yang legitimasi menurut konsep penelitian faktual dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

3.3. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karenanya, dalam melakukan pengukuran maka memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket yang disusun dengan memperhatikan aspek:

1. Materi pertanyaan bersifat standar, agar setiap responden mempunyai kesamaan pengertian terhadap maksud pertanyaan.
2. Konteks pertanyaan dibuat secara obyektif, sehingga diberlakukan kepada responden.
3. Relevan dengan obyek diatas
4. Kejelasan konsep variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel, dan menggunakan skala Likert dalam pengukuran jawaban dari para responden. dengan *skala Likert*, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat

positif sampai sangat negatif. dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skoring item instrumen

Skor Positif (+)	Skor Negatif (-)
4	1
3	2
2	3
1	4

Instrumen penelitian digunakan untuk nilai variabel yang akan diteliti adapun yang digunakan yaitu variabel tingkat partisipasi masyarakat Berikut ini adalah instrumen penelitian:

Tabel 3.2

INSTRUMEN PENELITIAN

VARIABEL	DIMENSI	SUB INDIKATOR	NO ITEM
Partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun	1. Penerimaan informasi	1. Cara memperoleh informasi	1,2
	2. Pemberian tanggapan terhadap informasi	1. Menyikapi terhadap program yang ada	3,4,
	3 Perencanaan pembangunan	1.Ambil bagian dalam fungsi perencanaan keputusan secara aktif	5,6
		2.Memberikan usulan dalam pembuatan keputusan	7
	4. Pelaksanaan pembangunan	1. Kontribusi uang tenaga dan barang	8,9,10
		2. Partisipasi dalam mensukseskan program	11,12,13
		3. Inisiatif dan kreatif dalam melaksanakan kewajiban	14,15,16
	5. Penerimaan kembali hasil pembangunan	1. Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas	17,18
		2. Adil dalam menikmati hasil (manfaat material, sosial dan pribadi)	19,20
	6.Penilaian hasil pembangunan	1. Mengetahui perkembangan dan keberhasilan program dalam pendidikan	21,22
		2. Menilai keberhasilan suatu program dalam pendidikan	23,24,25
	7. Proses stimulus/ motivasi	1. Memotivasi diri dan orang lain untuk mensukseskan program yang ada	26,27

3.3.1. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian di jelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alatukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang

diukur.(Umar: 2006). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas atau kesahihan di gunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur untuk mampu melakukan fungsi. Alat ukur yang dapat di gunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil skor pernyataan dan skor keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner.

Uji validitas digunakan sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevalidan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan di ukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus *Korelasi Product Moment*.

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Dimana :

- r = Koefisien Korelasi Product Moment
- $\sum x$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- \sum_{XY} = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum x^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

3.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Rely*, yang berarti percaya, dan *Reliable* yang artinya dapat di percaya. Reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. (Umar: 2006)

Uji reliabilitas di gunakan untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut di gunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Suharsimi (2006), reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik

Pengujian reliabilitas instrumen di lakukan dengan reliabilitas internal dengan menggunakan teknik *Alpha* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar berarti intrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus *Cronbach's Alpha*, sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right)$$

Dimana:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum\sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ^2t = varians total

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Definisi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (*Suharsini:2006*). populasi menurut *Sugiyono*, yakni wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (*Suharsini:2006*), Sedangkan pengertian sampel menurut *Sugiyono* adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari penjelasan di atas maka penulis mengambil populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang memiliki anak berusia sekolah SD dan SMP Sederajat, yang berada di Kecamatan Baros.

Setelah peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian, diketahui bahwa jumlah seluruh masyarakat Kecamatan Baros yaitu sebanyak 53.043 orang. Sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran sampel atas besaran populasi. Dengan menggunakan teknik *proportional area sampling*. Dikatakan *proportional area sampling* karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap-tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi pada pokoknya yaitu mengambil sampel

dari tiap-tiap sub populasi dengan memperhitungkan besar kecilnya sub populasi, sehingga nantinya jumlah sampel yang akan diambil akan menghasilkan sampel yang representatif. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajarsembilan tahu. Peneliti mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu sejumlah orang yang sudah berumah tangga dan memiliki anak sekolah, baik yang bersekolah SD maupu SLTP atau pun yang hanya minimal sekolah SD saja, yang mana di dapat 100 orang sampel yang di peroleh menurut teknik perhitungan slovin yang mana apabila lebih dari 10.000 orang dengan dk 10 % akan di dapat 100 orang.

Adapun tehnik penarikan sampel dari setiap wilayah / desa yang ada di Kecamatan Baros dilakukan dengan perhitungan sendiri yang berdasarkan jumlah penduduk yang ada di desa tersebut, dan perhitungannya dapat dilihat dalam tabel 3.4. maka peneliti mengambil sampel sebanyak 100 sampel yang kesemuanya tersebar di 14 Desa yang sudah di tentukan di atas. Sedangkan cara pengambilan sampel tersebut, peneliti menentukan secara *accidental sampling* .

Tabel 3.4
Perhitungan Sampel

Area	Jumlah Populasi	Perhitungan	Hasil Akhir
Sukacai	1.856	$\frac{1.856}{32.477} \times 100 = 5,7$	6
Sukamenak	3.337	$\frac{3.337}{32.477} \times 100 = 10,3$	10
Tejamari	2.075	$\frac{2.075}{32.477} \times 100 = 6,4$	6
Panyirapan	2.769	$\frac{2.796}{32.477} \times 100 = 8,5$	9
Taman Sari	1.698	$\frac{1.698}{32.477} \times 100 = 5,2$	5
Sindang Mandi	2.950	$\frac{2.950}{32.477} \times 100 = 9,1$	9
Curug Agung	1.661	$\frac{1.661}{32.477} \times 100 = 5,1$	5
Sukamanah	2.021	$\frac{2.021}{32.477} \times 100 = 6,2$	6
Padasuka	1.559	$\frac{1.559}{32.477} \times 100 = 4,8$	5
Sinarmukti	2.265	$\frac{2.265}{32.477} \times 100 = 7,0$	7
Sidamukti	2.527	$\frac{2.527}{32.477} \times 100 = 7,8$	8
Baros	3.488	$\frac{3.488}{32.477} \times 100 = 10,7$	11
Cisalam	2.225	$\frac{2.225}{32.477} \times 100 = 6,9$	7
Sukaindah	2.046	$\frac{2.046}{32.477} \times 100 = 6,3$	6
	32.477		100

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan data tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang dikumpul diolah menjadi beberapa proses berikuti ini:

- a. *Proses Editing*, yaitu melakukan edit terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil survei di lapangan. Pada prinsipnya proses editing data bertujuan agar data yang nanti akan dianalisis telah akurat, lengkap, dan dapat dilakukan proses selanjutnya (coding dan tabulasi)
- b. *Proses Pengkodean Data (Coding) Dengan SPSS*, agar data riset dapat diproses dengan menggunakan bantuan komputer (SPSS 16) maka data tersebut harus berupa data numerik (angka). Dengan demikian, semua data kualitatif juga harus dikuantitatifkan (dijadikan angka).
- c. *Tabulating*, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta perhitungan kulaitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel

3.5.2 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, terutama data yang dihasilkan melalui kuesioner yang menggunakan analisis statistik

sederhana. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji data yang bersifat kuantitatif. Maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian.

3.5.1.1. Uji T-tes

Pengujian validitas dan realibilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini akan menggunakan uji T karena variabel penelitian dalam penelitian ini bersifat tunggal. Dan uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih variabel yang datanya berbentuk interval maka digunakan uji t-test sample, dan menggunakan uji pihak kiri, karena t tabel berada di sebelah kiri t hitung. Untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan uji t-test sampel, dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu 0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

t = nilai t yang dihitung

\bar{x} = nilai rata-rata

$\mu 0$ = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis satu pihak dengan uji pihak kanan. Karena Hipotesis Nol (H_0) berbunyi ($\leq 65\%$) dan Hipotesis alternatifnya (H_a) berbunyi ($> 65\%$). Dengan demikian berlaku ketentuan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} \rightarrow H_0$ diterima / H_a ditolak

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} \rightarrow H_0$ ditolak / H_a diterima.

3.6.Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang* ini berlokasi di Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten. Yang dilakukan dari bulan September 2011 sampai bulan maret 2012.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Table 3.5.
Jadwal Penelitian

no	kegiatan	2011				2012		
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Acc Judul	■						
2	Pengumpulan Data dan Observasi Awal	■	■					
3	Penyusunan Proposal		■	■				
4	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		■	■				
5	Seminar Proposal				■			
6	Revisi Proposal					■	■	
7	Observasi dan Penyebaran Kuesioner				■	■	■	
8	Analisis Data					■	■	■
9	Penyusunan Hasil Penelitian				■	■	■	■
	Sidang Skripsi					■	■	■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

4.1.1. Letak Geografis Kecamatan Baros

Wilayah Kecamatan Baros terletak sebelah selatan dari Kabupaten Serang, yang memiliki Luas wilayah $44,07 \text{ Km}^2$ atau 440.700 Ha dengan dengan karakteristik wilayah adalah perdesaan yang dilalui jalan Provinsi $\pm 8 \text{ Km}^2$, jalan Kabupaten $\pm 12 \text{ Km}^2$ dan jalan Desa $\pm 240 \text{ Km}^2$. Batas wilayah Kecamatan Baros yaitu :

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang .
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curug Kota Serang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Petir.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran.

4.1.2. Keadaan penduduk

Wilayah Kecamatan Baros terdiri dari 14 Desa dengan jumlah RT 215 dan 74 RW dengan jumlah penduduk 53.043 jiwa, jumlah laki –laki 27.278 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 25.765 jiwa, serta 10.521 jumlah KK, dengan kepadatan penduduk wilayah Kecamatan Baros $1.215.77 \text{ Km}^2$.

Table 4.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Baros Tahun 2010
Berdasarkan Usia

no	kelompok umur	jumlah
1	2	5
1	0 - 4	5,247
2	5 - 9	5,345
3	10 - 14	4,945
4	15 - 19	6,462
5	20 - 24	5,368
6	25 - 29	5,235
7	30 - 34	4,288
8	35 - 39	4,127
9	40 - 44	3,358
10	45 - 49	2,606
11	50 - 54	2,221
12	55 - 59	1,042
13	60 - 64	1,101
14	65 - 69	0,845
15	70 - 74	0,437
16	>75	0,416
		53,043

(Sumber: Kecamatan Baros 2011)

Penduduk Kecamatan Baros terdiri dari beberapa mata pencaharian diantaranya, Petani, Buruh Tani, Pedagang Buruh, PNS/ABRI, Wiraswasta/ Pegawai Swasta, dengan perincian sebagai berikut

Table 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Baros

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	3.540
2	Buruh Tani	5.404
3	Pedagang	2.648
4	Buruh	3.178
5	PNS/ABRI	391
6	Wiraswasta/ Pegawai Swasta	1.730

Sumber (Kecamatan Baros 2011)

Wilayah Kecamatan Baros dalam menunjang mutu pendidikan memiliki lembaga TK/ PAUD yang berjumlah 18 buah, SD/MI berjumlah 26 buah SLTP/ MTS berjumlah 8 Buah, SLTA/ MA berjumlah 4 buah serta pesantren.

Table 4.3.**Sebaran Sekolah Di Kecamatan Baros Dan Jumlah Peserta Didik**

No	Nama Desa	Nama Sekolah	Siswa		
			L	P	Jumlah
1	Baros	TK Bhakti 5	22	13	35
		SDN Baros 1	189	162	351
		SDN Baros 2	173	175	348
		SDN Sengir	171	167	338
		SDN Sumur Peuteuy	141	141	282
2	Sidamukti	SDN Sidamukti 1	180	164	344
		SDN Sidamukti 2	130	143	273
		SMPN 3 Baros	193	177	370
3	Sukacai	SDN Sukacai 2	173	158	331
		SDN Sukacai 3	101	98	199
4	Taman Sari	SDN Taman Sari	166	169	335
5	Tejamari	SDN Tejamari 1	168	141	309
		SDN Pasir	155	122	277
6	Sindang Mandi	SDN Sindang Mandi	208	142	350
		SDN Rampones	104	64	168
		MIS Muta'alamin	96	106	202
		MIS Maftahul Huda	148	137	285
		SMPN 2 Baros	238	268	506

		MTS Muta'alimin	48	41	89
7	Panyirapan	SDN Panyirapan	94	90	184
		SDN Warung	250	224	474
		MI Jamiyatul Usbuiyah	120	80	200
		SMPN 1 Baros	433	462	895
		SMAN 1 Baros	217	221	438
8	Sinar Mukti	SDN Parung Sentul	108	100	208
9	Sukamana	SDN Baros 3	178	171	349
		SDN Pagedongan	144	141	285
		MIN Baros	225	240	465
		SMP Attaufiqiyyah	229	175	404
		SMP Terpadu Bani Nur	53	54	107
		MTS Nurul Huda	188	161	349
		SMA Attaufiqiyyah	55	71	126
		SMK Attaufiqiyyah	205	10	215
		SMK Nurul Huda	208	226	434
10	Curug Agung	SDN Kalibuntu	172	125	297
11	Cisalam	SDN Cisalam	122	121	243
		SDN Daragem	99	100	199
12	Sukamenak	SDN Tejamari 2	181	186	367
		SDS Bani Nur	78	71	149
		SMP IT Ar-Raudhah Al-Bantani	77	81	158
13	Padasuka	SDN Padasuka	105	108	213
14	Sukaindah	SDN Suka Indah	239	202	441
			6584	6008	12592

Sumber: (UPTD Kecamatan Baros dan penelitian 2011)

Table 4.4**Jumlah Sekolah Dan Siswa Di Kecamatan Baros**

No	Jenjang /Status Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	TK	1	22	13	35
2	SD/MI Negri	24	3976	3654	7630
3	SD/MI Swasta	4	442	394	836
4	SMP Negri	3	864	907	1771
5	SMP/Tsanawiyah Swasta	5	595	512	1107
6	SMA / Sederajat Negri	1	217	221	438
7	SMA / Sederajat Swasta	2	55	71	126
8	SMK Swasta	2	413	236	649
	Jumlah	42	6584	6008	12592

Sumber: (UPTD Kecamatan Baros dan penelitian 2011)

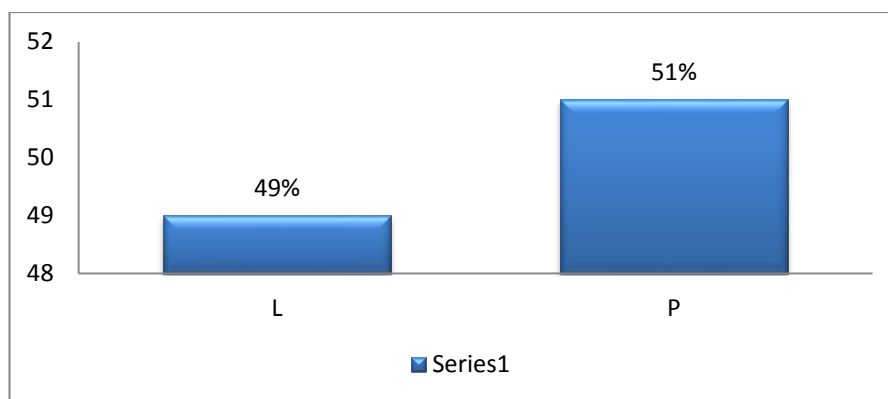
Wilayah Kecamatan Baros memiliki jumlah instansi / dinas diantaranya adalah Puskesmas 1 buah, Puskesmas Pembantu 2 buah, UPTD pendidikan, UPTD Pertanian, UPTD Pengairan, Balai Benih Ikan, PLKB, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Serta fasilitas social dan Fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Baros adalah berupa Pasar, Bank/LPK 3 buah, Pos dan Giro, jaringan listrik dan telfon yang terdapat di seluruh wilayah Kecamatan Baros, Pom Bensin 2 buah, Sarana Peribadatan, PDAM dan Sarana Olahraga /Lapangan.

4.2. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Dalam pembahasan ini akan disajikan data yang menyangkut beberapa karakteristik dasar dari para responden penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Hal tersebut mencakup karakteristik menurut kelompok responden, jenis kelamin, usia, keyakinan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Jumlah Total Responden menurut Jenis Kelamin.

Diagram 4.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

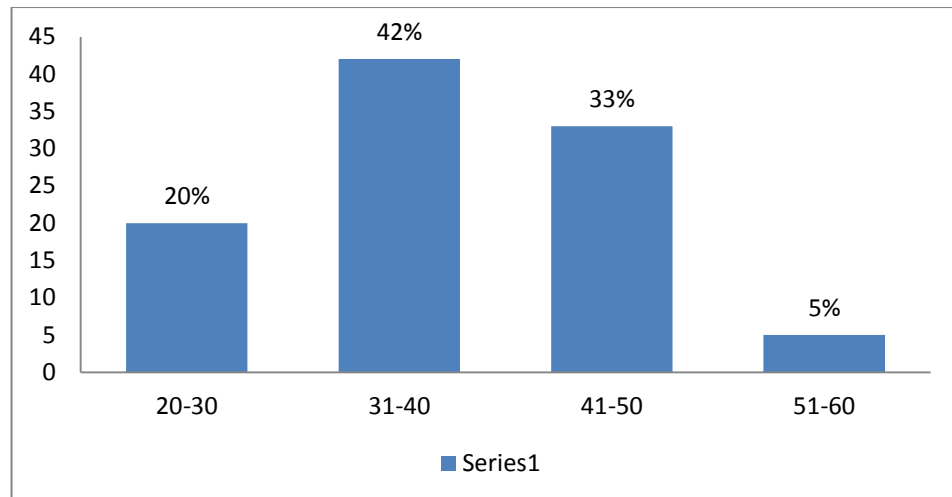


Sumber: (diolah penelitian 2012)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 49% responden adalah berjenis kelamin Laki - laki, dan perbedaannya sangat sedikit dengan responden perempuan sebanyak 51. Jadi dalam hal ini adanya kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang sama untuk menjadi responden sehingga membantu dalam hal persamaan persepsi dalam kesetaraan gender untuk pengisian kuesioner yang akan dilakukan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur

Diagram 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur

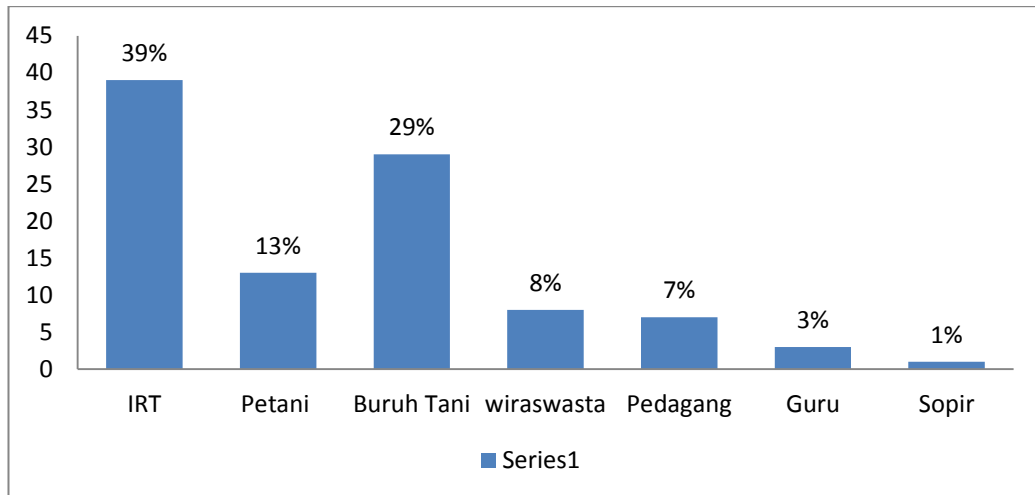


Sumber: Data diolah, 2012.

Dari tabel di atas nampak dengan jelas bahwa sebagian besar responden berusia rentang antara 20-59 tahun, sebuah rentang usia yang telah dewasa sehingga referensi pengalaman dan pendidikan maupun emosionalnya telah mapan sehingga dalam memberikan penilaian akan lebih objektif dan realistis lagi bila usianya telah menginjak 59 tahun biasanya pola pemikirannya akan lebih terarah.

c. Jumlah Responden menurut Jenis Pekerjaan

Diagram 4.3
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



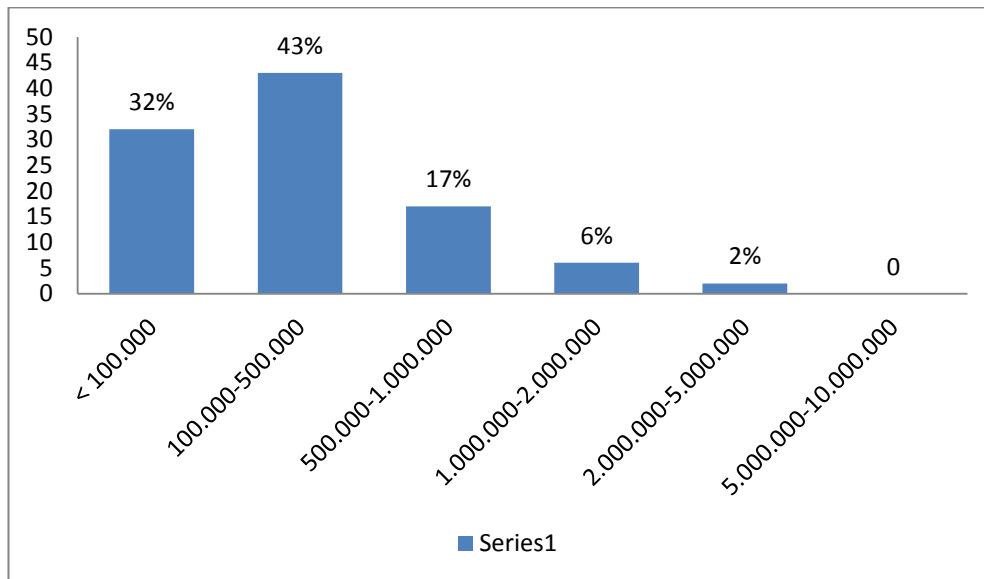
Sumber: Data diolah, 2012.

Dari tabel di atas nampak bahwa variasi pekerjaan responden mempunyai representasi masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaan. Sehingga dapat dikelompokkan menurut jenis pekerjaan pada saat pengisian kuisioner yang dilakukan.

Jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Baros sangat beragam, dan ini akan memberikan sudut pandang menurut kaca mata mereka mengenai perencanaan pembangunan.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendapatan

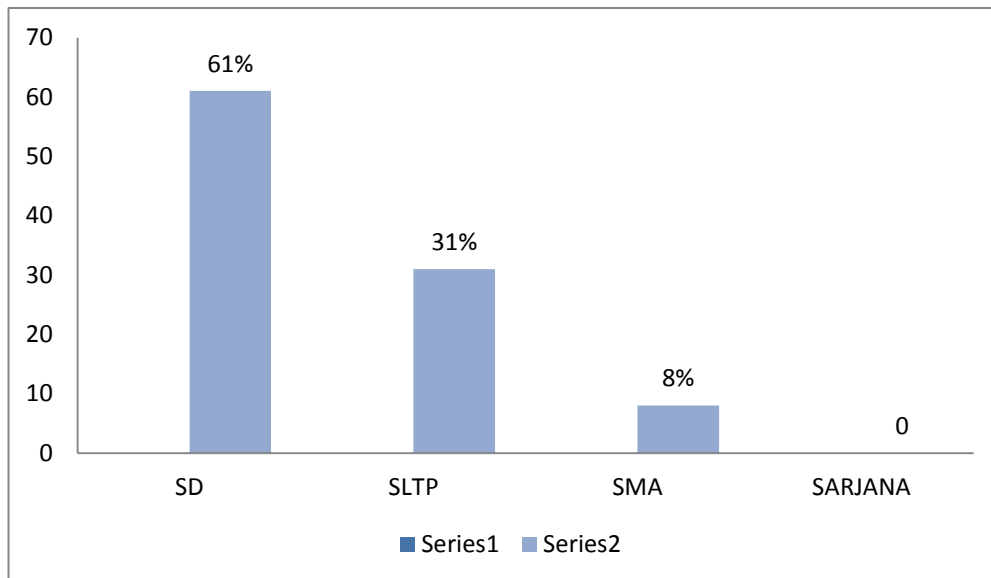
diagram 4.4
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan



Sumber: Data diolah, 2012

Tingkat pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi sejauh mana mereka dapat ikut berpartisi serta dalam program pembangunan / kebijakan yang di buat oleh pemerintah, dalam hal ini terutama ppertisipasi masyarakat dalam pendidikan, semakin besar pendapatan seseorang semakin besar pula peluang mereka untuk ikut berpartisi pasi, tetapi dengan tingkat pendapatan yang rendah sangat besar kemungkinan mereka untuk tidak ikut berpartisipasi dalam menunjang pendidikan Anak anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Diagram 4.5
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan



Jenjang pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pola pikir mereka, tetapi semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin sempit pola pikir mereka, dengan pola pikir yang sempit itulah yang bisa menghambat perkembangan seseorang dalam dunia modern seperti sekarang ini, dalam hal ini terutama dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia.

4.3. ANALISIS DATA

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Analisis data penelitian yang dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan uji validitas instrumen guna menjaga ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Adapun rumus yang

dilakukan adalah menggunakan statistik korelasi *Product moment* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji butir pertanyaan)

No	Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi (R Hitung)	R Tabel (1%)	Keterangan
1	1	0,509	0,256	VALID
2	2	0,670	0,256	VALID
3	3	0,735	0,256	VALID
4	4	0,693	0,256	VALID
5	5	0,790	0,256	VALID
6	6	0,649	0,256	VALID
7	7	0,828	0,256	VALID
8	8	0,603	0,256	VALID
9	9	0,598	0,256	VALID
10	10	0,581	0,256	VALID
11	11	0,580	0,256	VALID
12	12	0,751	0,256	VALID
13	13	0,461	0,256	VALID
14	14	0,795	0,256	VALID
15	15	0,768	0,256	VALID
16	16	0,478	0,256	VALID
17	17	0,614	0,256	VALID
18	18	0,357	0,256	VALID
19	19	0,640	0,256	VALID
20	20	0,652	0,256	VALID
21	21	0,448	0,256	VALID
22	22	0,475	0,256	VALID
23	23	0,556	0,256	VALID
24	24	0,687	0,256	VALID
25	25	0,703	0,256	VALID
26	26	0,655	0,256	VALID
27	27	0,696	0,256	VALID

Sumber: Data diolah, 2012.

Adapun kriteria pengujian item/butir yang digunakan adalah dimana jika r hitung $>$ r tabel, berarti item/butir instrumen bisa dinyatakan valid, dan jika r hitung $<$ r tabel, berarti item/butir instrumen bisa dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua instrumen dinyatakan valid artinya instrumen tidak perlu diganti karena indikator sudah terukur dari instrumen lainnya.

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang tidak dinyatakan valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,943 jika kita mengacu pada Siegel yang menggunakan pedoman reliability instrumen adalah sebesar 0.7 artinya 0,943 lebih besar dari 0,7 sehingga instrumen yang diuji bisa dikatakan reliable.

Tabel 4.2. tabel reliabilitas

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

Cronbach's Alpha	N of Items
.943	27

Sumber: SPSS 16.0

4.3.3. Deskripsi Data

Data yang diperoleh oleh peneliti Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara menyebarkan kuseioner kepada 100 responden masyarakat kecamatan baros dengan menggunakan teori yang dipakai oleh taliziduhu Ndraha tentang partisipasi dengan tujuh Dimensi yaitu 1. Penerimaan informasi, 2. Pemberian tanggapan terhadap informasi, 3. Perencanaan pembangunan, 4. Pelaksanaan pembangunan, 5 penerimaan kembali hasil pembangunan, 6. Penilaian hasil pembangunan dan 7. Proses stimulus/ motivasi. di dapat hasil sebagai berikut:

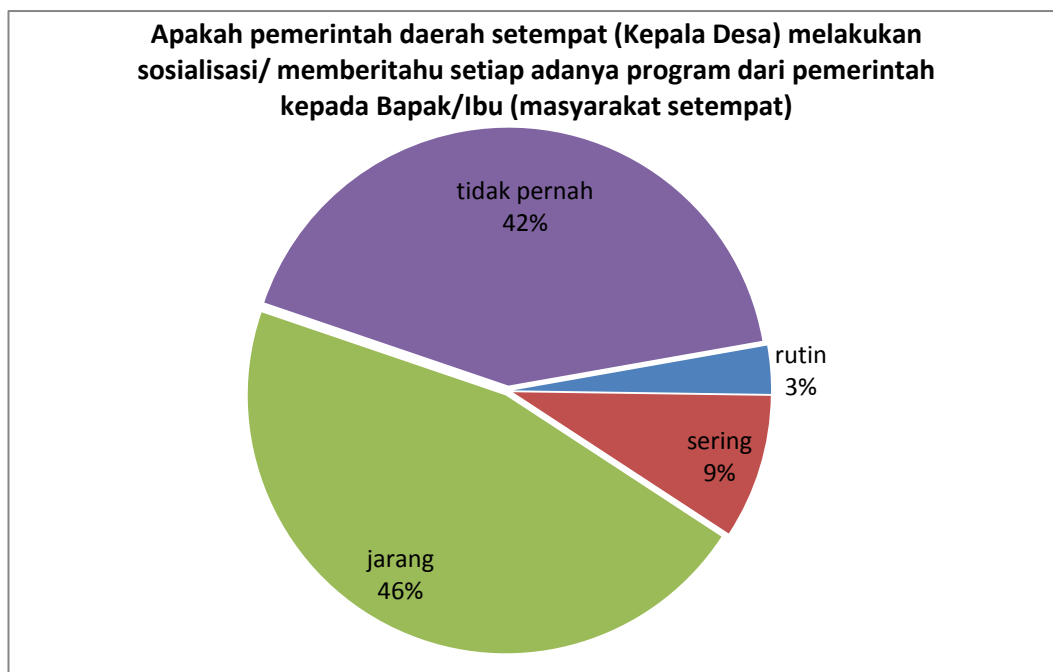
1. Dimensi Penerimaan Informasi

Dimensi penerimaan informasi menakup pertanyaan no 1 dan 2 yaitu : Tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah setempat (Kepala Desa) melakukan sosialisasi/ memberitahu setiap adanya program

wajib belajar Sembilan tahun dan Tanggapan Masyarakat Dalam Memahami Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Diagram 4.6

Tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah setempat (Kepala Desa) melakukan sosialisasi/ memberitahu setiap adanya program wajib belajar Sembilan tahun



Sumber : data diolah penelitian 2012(kuesioner No.1)

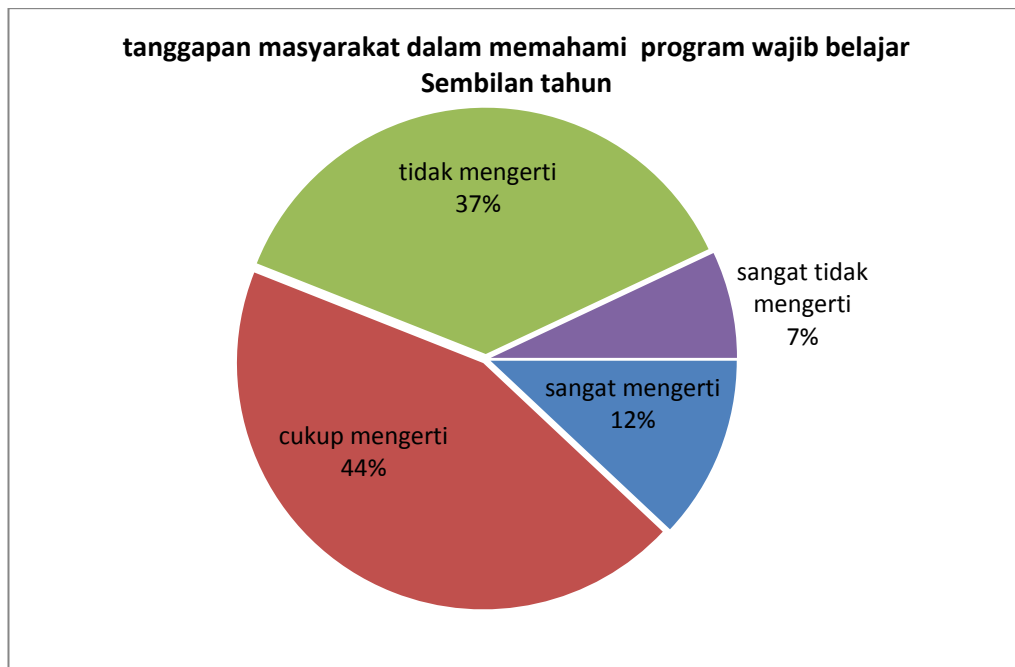
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 46 menjawab jarang dan 42 orang menjawab tidak pernah. ini berarti dalam memberikan informasi kepada masyarakat pemerintah setempat tidak pernah melakukannya. Artinya kurangnya perhatian dari pemerintah dalam program wajib belajar Sembilan tahun. Selain jawaban yang diberikan oleh responden setelah peneliti melakukan observasi dan mengamati selama beberapa bulan serta melakukan wawancara kepada Karang Taruna yang ada di

Kecamatan Baros, organisasi yang ada di Baros serta masyarakat lain pada umumnya. Dari hasil tersebut hampir seluruh pemerintah daerah terkait dalam hal ini pemerintah desa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait program pendidikan serta program lainnya yang seharusnya masyarakat mengetahuinya

Hal ini terlihat hanya 9 orang yang menjawab ruti dan 3 orang yang menjawab pernah ini diartikan mereka adalah yang memiliki hubungan dekat dengan lembaga daerah jadi setiap ada informasi mereka bisa langsung memperolehnya baik dari kepala desa maupun pegawainya langsung. Akan tetapi secara keseluruhan pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat setempat. Dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa membuat banyaknya masyarakat yang berperan pasif dalam meningkatkan pembangunan terutama di bidang pembangunan pendidikan

Diagram 4.7

Tanggapan Masyarakat Dalam Memahami Program Wajib Belajar Sembilan Tahun



Sumber : data diolah penelitian 2012(Kuesioner No. 2)

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya 12 orang yang menjawab sangat mengerti, hal ini di karenakan responden yang menjawab yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau mereka yang yang dekat dengan lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan. 44 orang yang menjawab cukup mengerti, karena mereka faham dari apa yang mereka dengar dari orang yang tahu dan ada keinginan dari mereka bertanya ke lembaga pendidikan di mana anaknya bersekolah.

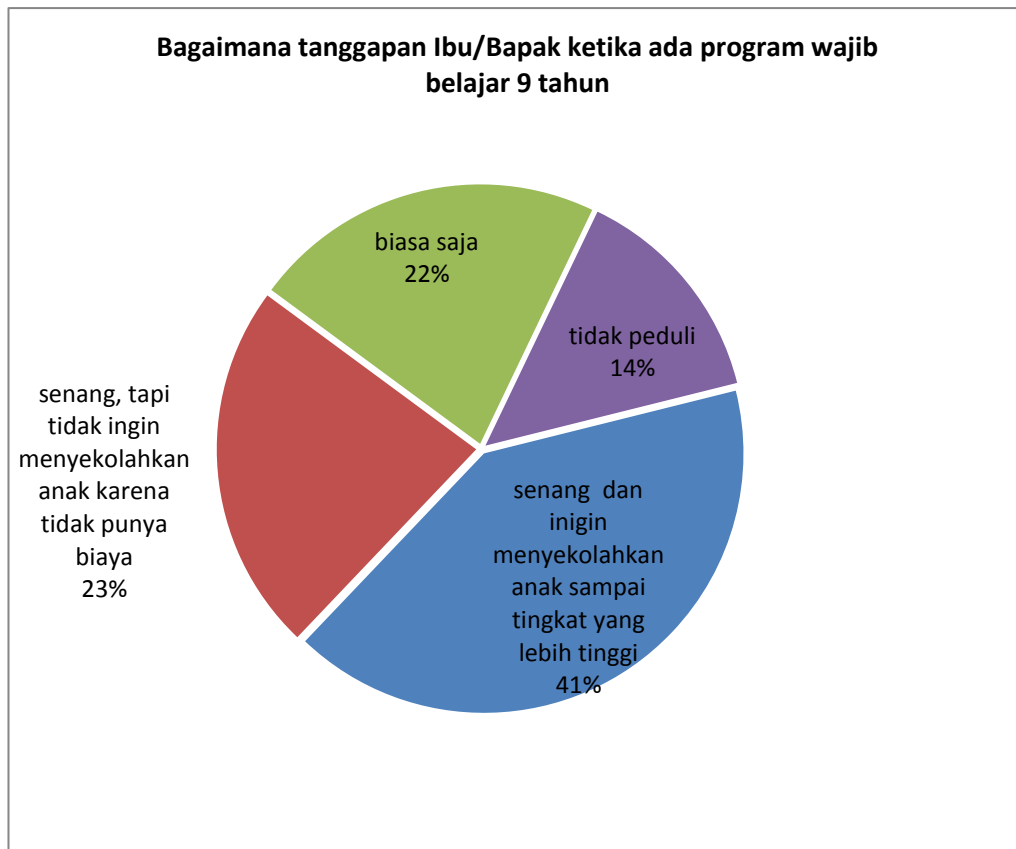
Bagi mereka yang menjawab tidak mengerti sama sekali dan yang tidak mengerti berjumlah lumayan banyak hanya berbanding sama dengan yang menjawab cukup mengerti yaitu berjumlah 44 orang. Ketidak mengertian mereka

dari hasil observasi di karenakan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, sebagaimana terlihat dari pertanyaan dari no satu, selain itu juga karena keinginan mereka untuk tidak ingin mengerti karena kebanyakan dari masyarakat yang pendidikannya rendah dan pola pikir mereka yang tidak mau ribet dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini berarti semakin banyak orang yang tidak mengerti dengan program tersebut semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya, disamping itu didukung dengan kurangnya materi yang mereka miliki

2. Dimensi Pemberian Tanggapan Terhadap Informasi

Dimensi Pemberian Tanggapan Terhadap Informasi ini mencakup pertanyaan dari no 3 dan 4 yaitu Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Tanggapan mengenai apakah sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah

Diagram 4.8
Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 3)

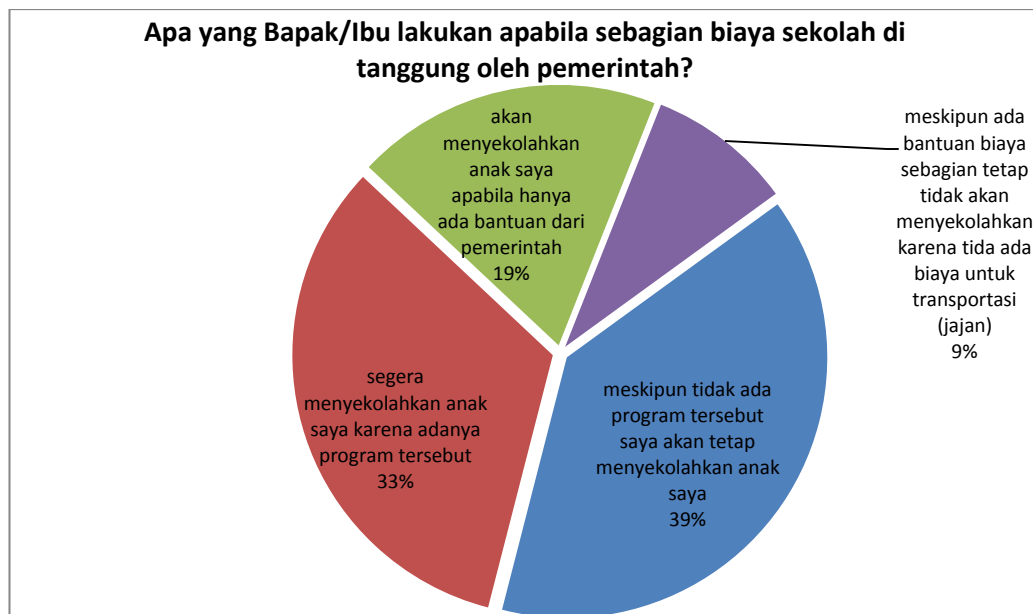
Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa yang menjawab senang dan ingin menyekolahkan anaknya dengan adanya program wajib belajar Sembilan tahun baik yang punya biaya dan yang tidak punya biaya berjumlah 64 % atau 64 orang. Ini berarti banyak sekali masyarakat yang berharap penuh dengan adanya program wajib belajar Sembilan tahun ditambah dengan adanya program pendukung seperti BOS yang membuat biaya gratis agar mereka bisa menyekolahkan anaknya dengan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. Mereka

senang dengan adanya program tersebut karena mereka benar-benar berharap pemerintah memberikan perhatian dan bantuan kepada anak – anaknya dalam membiayai sekolah anak – anak mereka .

Terlihat ada beberapa orang yang menjawab biasa saja dan tidak peduli yaitu berjumlah 22 orang atau 22 % yang menjawab biasa saja dan 14 orang atau 14 % yang menjawab tidak peduli. Ini berarti setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan bertanya mereka tidak peduli bukan karena mereka tidak tahu karena mereka menganggap ada atau tidak adanya program tersebut tidak akan merubah sikap mereka dalam menyekolahkan anaknya, karena mereka bilang hanya biaya sekolah saja yang gratis tetapi mereka masih perlu ongkos atau uang jajan untuk sehari-harinya, ini lah yang kami permasalahkan menurut salah satu masyarakat yang berkata. Selain itu ada yang tidak peduli karena memang benar-benar tidak tahu. Ketidak pedulian mereka menganggap ada atau tidak nya program tersebut tidak bisa merubah keadaan keluarga mereka, karena keadaan ekonomi yang rendah sehingga tetap mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya, karena menurut mereka meskipun ada bantuan tetap saja anak- memerlukan uang makan (jajan) serta biaya transportasi kesekolah).

Diagram 4.9

Tanggapan mengenai apakah sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 4)

Dari tabel diatas dapat dilihat partisipasi masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk menunjang kehidupannya hanya 39 % yang menjawab atau sebanyak 39 orang, dari hasil tersebut yang diperoleh peneliti dari hasil penyebaran kuesioner hanya sedikit yang benar-benar sadar akan menyekolahkan anaknya, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sambil penyebaran kuesioner masih banyak yang sangat tergantung akan adanya bantuan dari pemerintah untuk menyekolahkan anaknya, bahkan ada yang sama sekali tidak peduli dengan adanya program tersebut. Ada yang menganggap ada atau tidaknya program tersebut mereka tidak akan menyekolahkan anaknya karena keadaan masyarakat baros yang perekonomian yang lemah, untuk jenjang SD

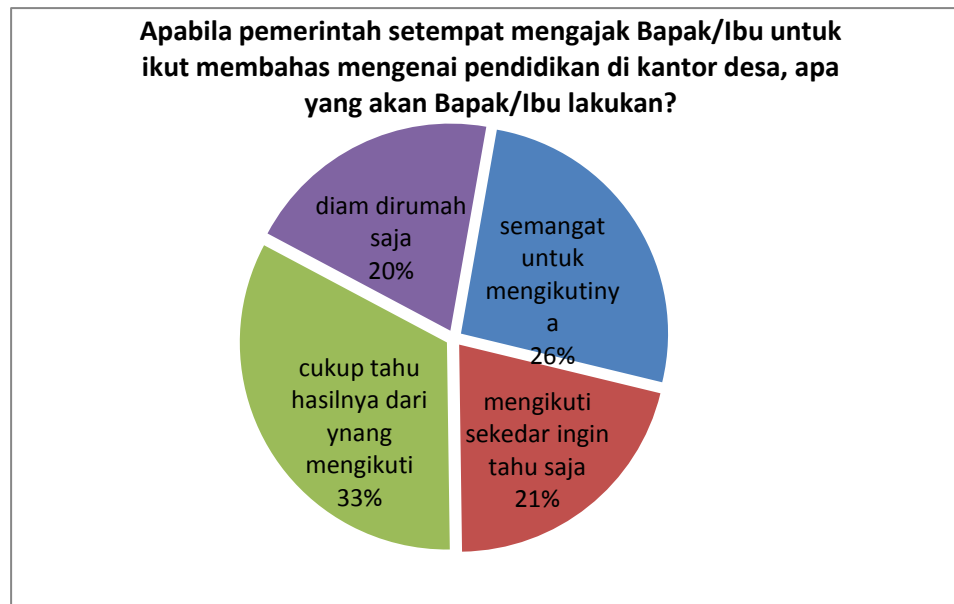
mereka masih mau menyekolahkan anaknya tetapi untuk jenjang SMP kebanyakan tidak mau karena transportasi yang mereka pikirkan

Seperti yang disebutkan Sisanya mereka sama sekali tidak berpartisipasi langsung dalam program tersebut, hal tersebut karena beberapa factor, yang pertama karena tidak memiliki biaya atau keadaan perekonomian keluarga yang rendah serta pemikiran orang tua yang kolot yang menanggap tidak penting mengikuti sekolah yang hanya akan menghabiskan uang saja dan hasilnya tidak ada.

3. Dimensi Perencanaan Pembangunan

Dalam dimensi Tanggapan mengenai apabil sebagian biaya ditanggung oleh pemerintah menakup pertanyaan dari no 5-7 yaitu : Tanggapan Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa, Tanggapan mengenai diwajibkannya pendidikan Sembilan tahun dan Tanggapan akan diberi kesempatannya masyarakat dalam berbicara dalam musyawarah mengenai pendidikan.

Diagram 4.10
Tanggapan Mengenai Keikutsertaan Masyarakat Dalam Musyawarah
Desa



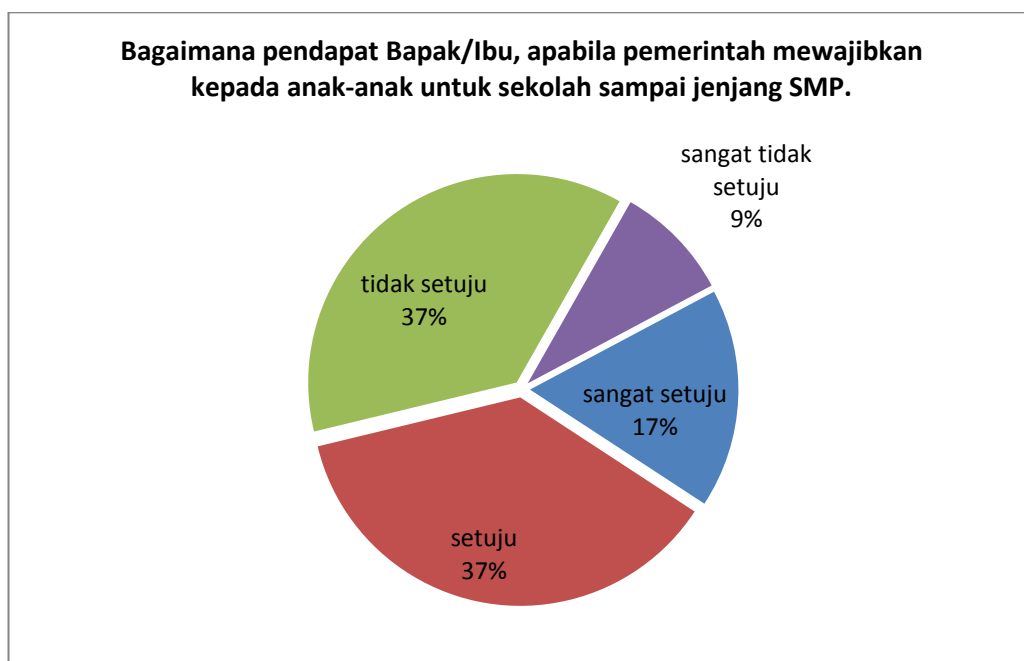
Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 5)

Dari tabel diatas dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terutama dalam pendidikan terlihat masih rendah terbukti hanya 26 orang atau 26 % yang menjawab semangat untuk mengikuti acara musyawarah yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Beberapa alasan kenapa hanya 26 orang yang mau ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa bagi mereka yang tidak ikut alasannya antara lain. Masih sibuk dengan pekerjaan dirumah dan disawah, menurut mereka lebih penting pergi kesawah daripada mengikuti musyawarah di desa. Dengan meninggalkan satu hari saja pekerjaan mereka. Mereka tidak akan mendapatkan uang makan untuk besoknya. Selain itu bagi ibu-ibu lebih repot dengan urusan rumah tangganya

dengan mengurus anak yang kecil dan mengurus rumah saja tidak sempat untuk pergi ke tempat untuk mengikuti musyawarah.

Dari data diatas Ini dapat diartikan mereka yang memiliki keinginan untukm embangun hanya sedikit dari 100 orang, yang lainnya seperti yang menjawab mengikuti hanya sekedar ingin tahu saja yang berjumlah 21 orang 21 % dapat diartikan setelah mereka mengikuti kepedulian mereka tidak sebesar yang diharapkan sebagaimana program tersebut dibuat, mereka akan beranggapan biasa saja terhadap program yang ada. selebihnya sisanyayang berjumlah 59 % atau 59 orang dapat diartikan sangat kurang sekali masyarakat yang berpartisipasi untuk keikutsertaannya dalam perencanaan suatu program yang akan dibuat

Diagram 4.11
Tanggapan mengenai diwajibkannya pendidikan Sembilan tahun



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 6)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa lebih dari 50 % orang yang menjawab setuju dan sangat setuju akan di wajibkannya program wajib belajar Sembilan tahun. Mereka yang berkata setuju dan sangat setuju akan diwajibkannya program tersebut dengan harapan pemerintah benar-benar membantu dalam pelaksanaan program tersebut yaitu dengan menggratiskan semua biaya baik biaya sekolah maupun oprasional untuk siswa. Dalam hal ini harapan mereka cukup besar ketika pemerintah mewajibkan untuk kepada semua masyarakat untu sekolah sampai jenjang SLTP sehingga apabila di wajibkan bantuan dari pemerintah pun aka nada dalam menguarngi beban mereka, sehingga mereka setuju dengan adanya program tersebut.

Bagi mereka yang menjawab tidak setuju mereka menganggap untuk apa di wajibkan belajar sampai jenjang SLTP toh pada akhirnya mereka akan sama saja tidak bisa mendapatkan pekejaan yang layak, akan bekerja di kampung-kampung juga atau disawah dan dikebun juga membantu orang tua. Dalam hal ini pengaruh factor kepbudayaan yang masih melekat pada diri masyarakat baros masih kental sekali, kebanyakan pola pikir mereka sebagai orang sunda lebih baik dirumah mempelajari ilmu agama dan membantu orang tua lebih baik dari pada memaksakan sekolah dengan keadaan ekonomi yang minim.

Diagram 4.12

Tanggapan akan diberi kesempatannya masyarakat dalam berbicara dalam musyawarah mengenai pendidikan



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 7)

Dari tabel diatas dapat dilihat yang menjawab akan bertanya kalau hanya ditanya. ini dapat diartikan sebagian besar orang sekitar 51 orang atau 51 % yang tidak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan suatu program yang di keluarkan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak memahami betul mengenai apa yang di bicarakan yang menyebabkan mereka akan enggan untuk ikut berpartisipasi dikarenakan pemahamannya kurang akan program yang ada. Disini factor pendidikan orang tua yang rendah ikut mempengaruhi ke pasifan mereka ketika mereka ada keinginan untuk mengikuti rapat atau acara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Malu itulah kata yang di berikan oleh mereka, dengan pendidikan yang rendah mereka merasa minder dan malu ketika ingin bertanya, padahal dalam benak mereka ingin sekali aktif untuk bertanya karena rasa malu

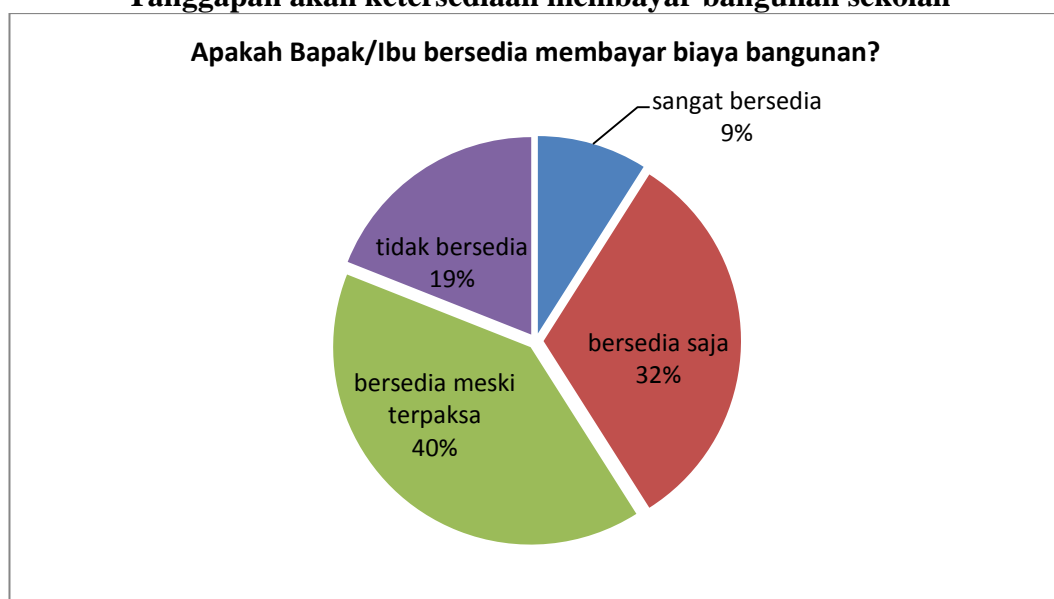
itulah sehingga mereka mngurngkan niatnya untuk bertanya, sehingga muncul kesan mereka tidak ada keinginan untuk berperan aktif dalam acara tersebut.

4. Dimensi Pelaksanaan Pembangunan

Dimensi Pelaksanaan Pembangunan mencakup pertanyaan dari no 8 -16 yaitu: Tanggapan akan ketersediaan membayar bangunan sekolah, Tanggapan akan ketersediaan membayar daftar ulang sekolah, Tanggapan mengenai kegiatan sekolah yang di adakan di sekolah, Tanggapan akan ketersediaan membantu dalam kegiatan sekolah/perayaan hari nasional dan ekstrakurikuler, Tanggapan akan memberikan motivasi kepada anak, Tanggapan mengenai dengan tidak sekolah apakah orang akan tetap mendapatkan penghasilan dan bisa memenuhi hidupnya, Tanggapan apabila pemerintah tidak memberikan bantuan, apa yang akan tetap dilakukan dan Tanggapan mengenai ketika anak pulang dari sekolah

Diagram 4.13

Tanggapan akan ketersediaan membayar bangunan sekolah

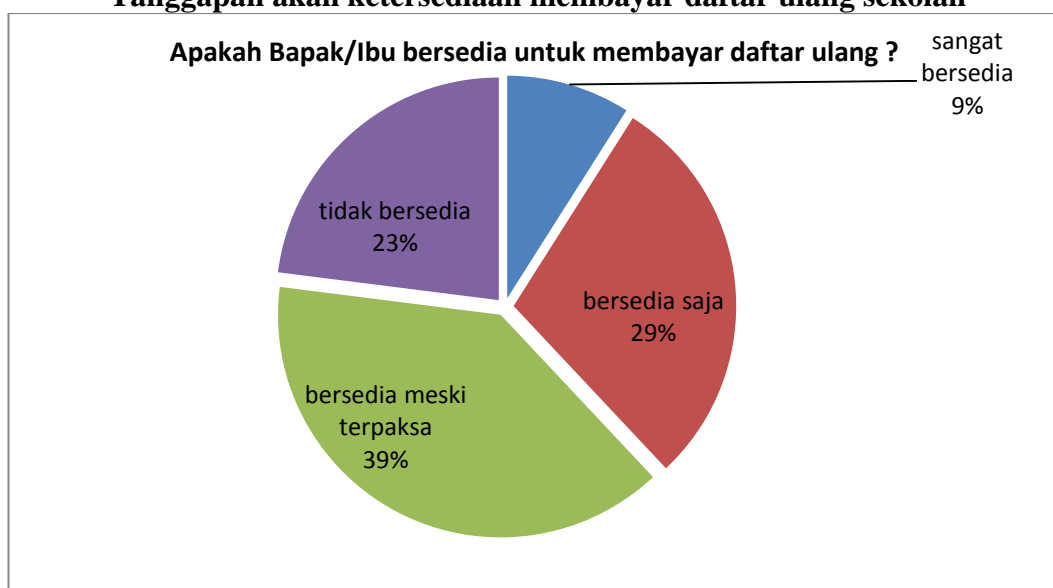


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 8)

Dari tabel diatas hanya 9 orang yang menjawab sangat bersedia. Tetapi yang lainnya menjawab mau membayar meski terpaksa tetapi yang lainnya memang benar-benar tidak bersedia. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden alasan mereka tidak bersedia membayar bangunan karena mereka berharap dengan adanya program dari pemerintah semua beban biaya sekolah di gratiskan. Tetapi ada masyarakat yang bilang masih saja ada sekolah yang meminta bayaran seperti bayaran bangunan disekolah sekolah SMP. Karena mereka tidak punya uang untuk membayar jadi mereka tidak mau membayarnya dan pada akhirnya anak berhenti sekolah karena malu kepada teman-temannya karena tidak bayar bangunan. Mereka yang mau membayar karena terpaksa, sebenarnya sangat berharap biaya itu digratiskan tetapi karena mereka ingin melihat anaknya lulus mereka akan mengusahakan untuk mencari biaya buat anaknya sekolah

Diagram 4.14

Tanggapan akan ketersediaan membayar daftar ulang sekolah

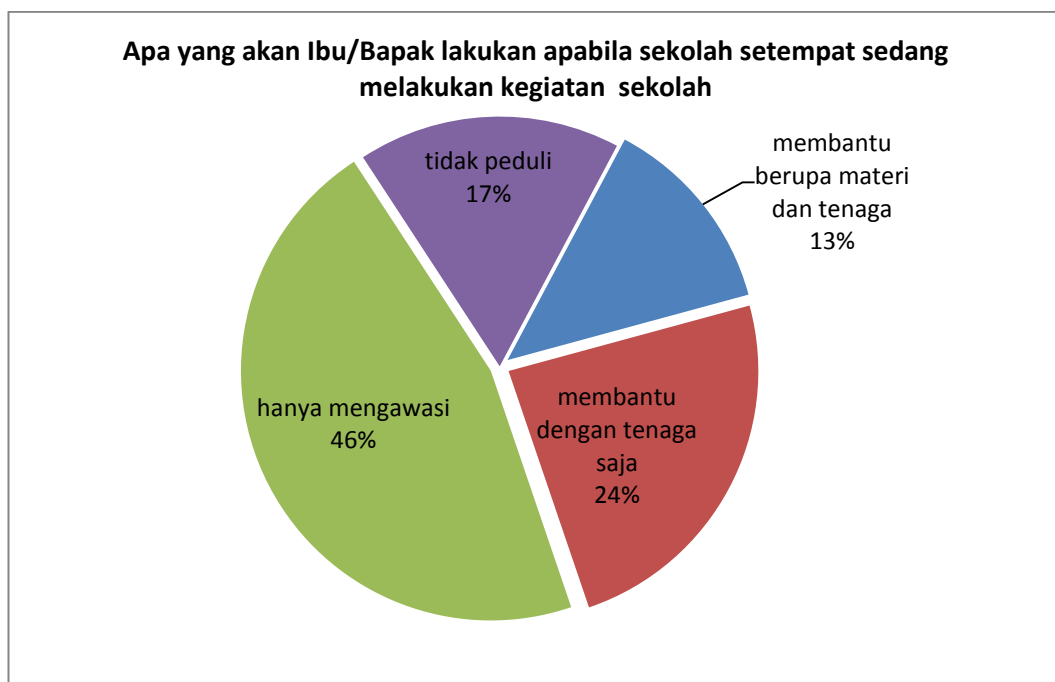


Sumber : data diolah penelitian 2012(Kuesioner No. 9)

Dari tabel diatas terlihat jelas hanya 9 orang (9%) yang menjawab sangat bersedia dan 29 orang (29 %) orang yang menjawab bersedia saja, Hal ini dapat diartikan, dengan 39 orang (39 %) yang menjawab bersedia meski terpaksa dan 23 orang (23 %) yang menjawab sama sekali tidak bersedia untuk membayar bangunan, masih banyaknya masyarakat yang mengharapkan pemerintah benar-benar membantu mereka dalam pendidikan anak-anak mereka karena dengan anggapan mereka seperti diatas menyebabkan banyaknya orang yang tidak menyekolahkan karena faktor biaya, dan keterpaksaan itu pun hanya akan berdampak sementara ketika mereka mampu untuk membayar lama kelamaan ketika mereka kesulitan perekonomiannya mereka akan menyuruh anaknya untuk berhenti.

Diagram 4.15

Tanggapan mengenai kegiatan sekolah yang di adakan di sekolah

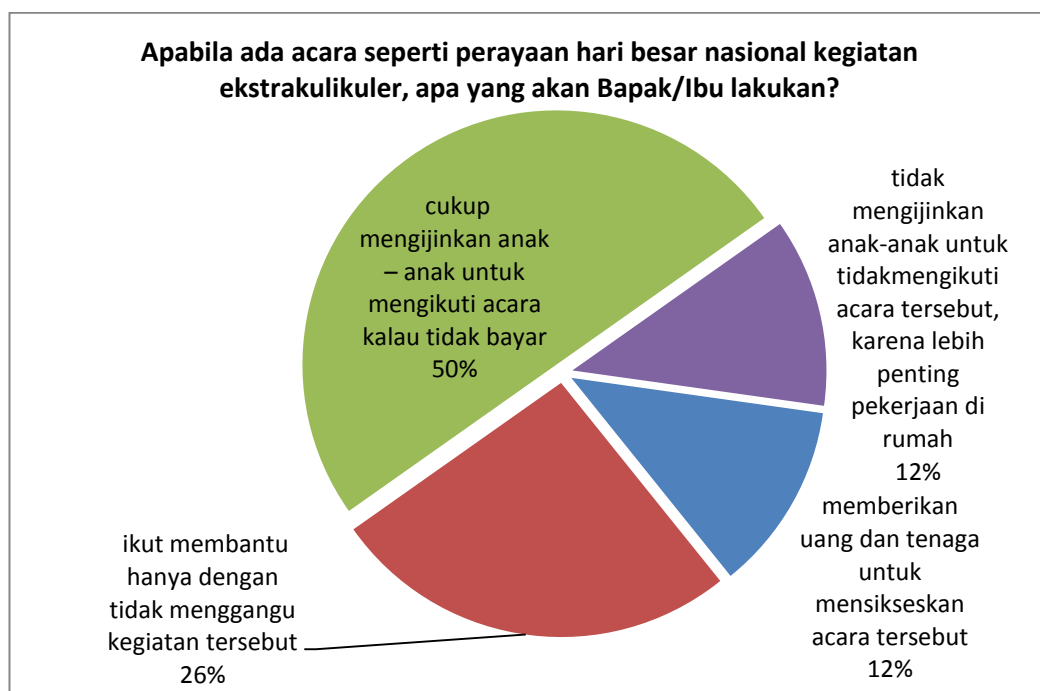


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 10)

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya 13 orang (13 %) yang menjawab mau membantu berupa tenaga dan materi dan tenaga dan 24 orang (24 %) yang menjawab membatu dengan tenaga saja.ini berarti sebagian masyarakat yang kurang akan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya disekolah sehingga kurangnya dukungan dan perhatian dari orang tua akan mengakibatkan anak yang tidak semangat untuk bersekolah, anak akan banyak bolos dan sebagainya sehingga menyebabkan anak keluar dari sekoalnya karena kurangnya perhatian dari orang tuanya

Diagram 4.16

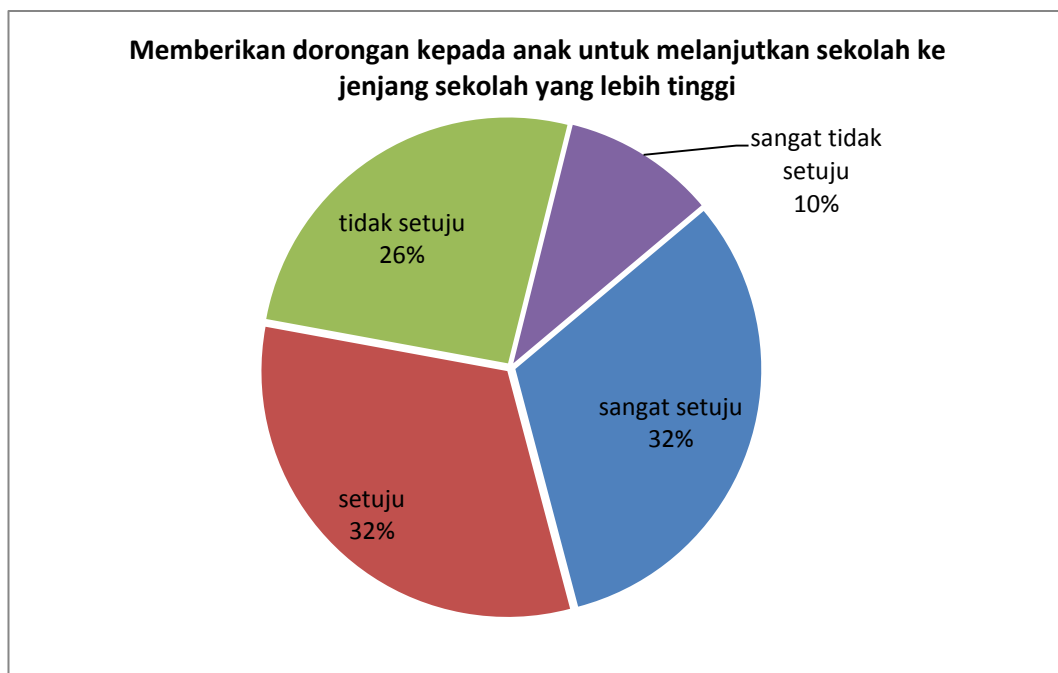
Tanggapan akan ketersediaan membantu dalam kegiatan sekolah/perayaan hari nasional dan ekstrakurikuler



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 11)

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya 12 orang (12 %) yang menjawab memberikan berupa materi dan tenaga untuk mensukseskan acara yang dilakukan di sekolah dan 26 orang (26 %) yang menjawab membatu hanya dengan tidak mengganggu kegiatan tersebut. .ini berarti sebagian besar masyarakat atau 62 orang (62%) yang kurang akan partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya disekolah terbukti dengan tidak boleh mengikutinya seorang anak dalam acara-acara yang diadakan disekolah, ini akan menyebabkan kedalam mental si anak dan pengetahuan si anak yang berkurang yang nantinya tidak tumbuh perkembangan pengetahuan pada sianak. Sianak pun akan minder karena dia tidak bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan disekolah.

Diagram 4.17
Tanggapan akan memberikan motivasi kepada anak



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 12)

Dari tabel diatas dapat terlihat 64 orang yang menjawab setuju ini berarti sebagian besar masyarakat mau dan menginginkan anaknya sekolah, tetapi keinginan ini tidak akan terwujud apabila ketika anak- sekolah perhatian dari orang tua yang kurang. Kebanyakan dari masyarakat yang di jumpai oleh peneliti mereka mendorong dan menyuruh anak-anak untuk sekolah hanya pada tingkatan SD saja tetapi selebihnya ketika mereka mau melanjutkan kejenjang SLTP orang tua bersikap lebih diam tergantung bagaimana anaknya, apabila anaknya yang meminta orang tua akan mengusahakan nya, apabila anaknya bersikap biasa orang tua pun tidak mempermasalahkan hal tersebut.hal ini dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

Diagram 4.18

Tanggapan mengenai dengan tidak sekolah apakah orang akan tetap mendapatkan penghasilan dan bisa memenuhi hidupnya



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 13)

Dari tabel diatas terlihat jelas hanya 35 orang (35 %) yang menjawab tidak setuju dan 12 orang (12 %) yang menjawab sangat tidak setuju. Ini dapat diartikan masih sebagian besar meskipun hanya berbanding tipis dengan orang yang beranggapan setuju 35 orang (35 %) yang menjawab setuju dan 18 (18 %) orang yang menjawab sangat setuju. Alasan mereka yang menganggap setuju apabila dengan sekolah tinggi belum tentu orang akan mendapatkan pekerjaan yaitu Karena pola pikir masih kolot, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta banyak di lingkungan mereka yang sampai sekolah smp masih saja menganggur di rumah susah untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik. Karena harus mengeleurkan uang untuk bisa bekerja di kota. Karena mereka tidak punya uang untuk membayar masuk kerja, jadi mereka terpaksa kerja di kampung membantu orang tuanya baik di kebun maupun di swah.

Diagram 4.19

Tanggapan apabila pemerintah tidak memberikan bantuan, apa yang akan tetap dilakukan

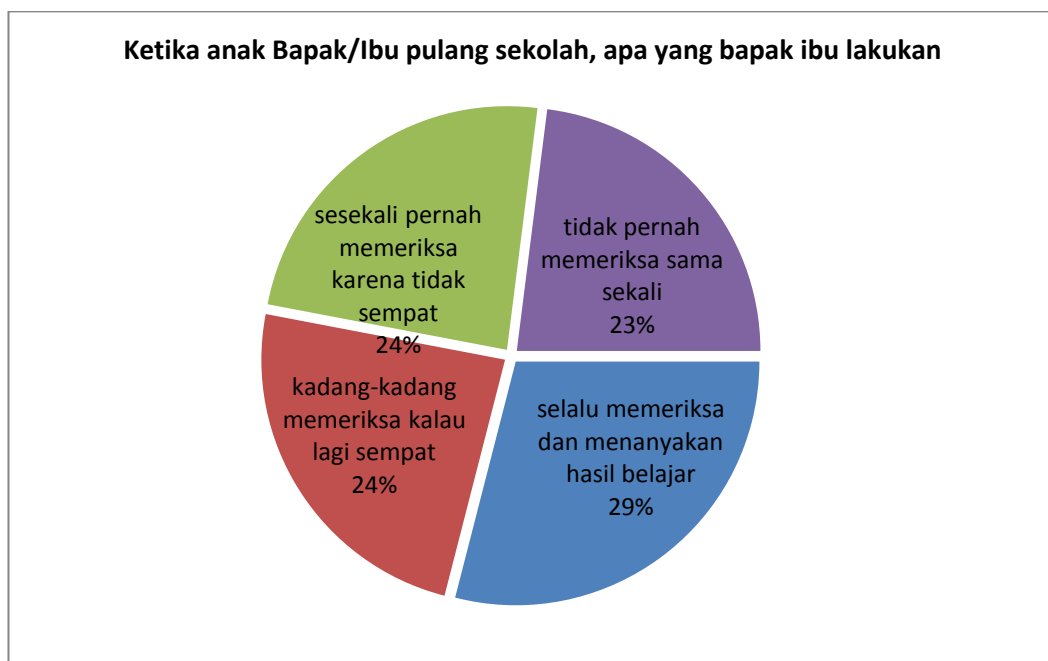


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 14)

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya 39 orang (39 %) yang menjawab tetap menyekolhkan mereka karena kewajiban sedang kan yang 20 orang (20 %) menjawab meyekolahkan kalau mereka yang minta, yang lain menjawab tidak begitu antusias untuk menyekolahkan anaknya karena factor biaya dank arena memang mereka tidak memntingkan untuk sekolah, hal ini dapat berarti partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya atas kesadaran sendiri masih rendah, mereka lebih mengharapkan bantuan dari pemerintah, ini akan mengakibatkan semakin banyaknya anak-anak yang menganggur dan tidak sekolah karena mereka menggantungkan hidupnya dari bantuan pemerintah saja

Diagram 4.20

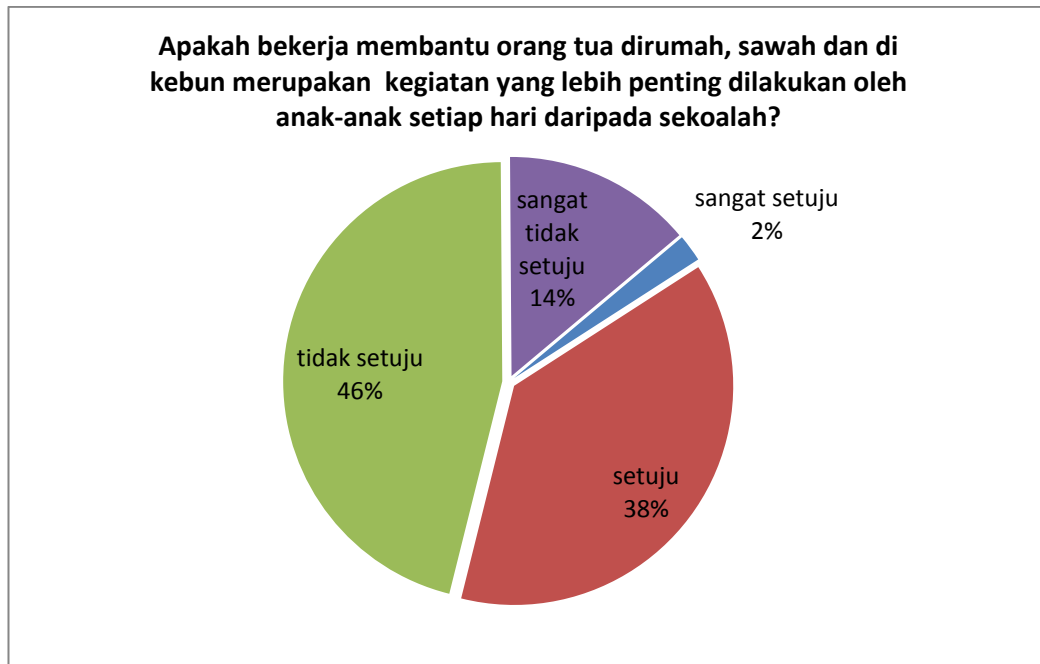
Tanggapan mengenai ketika anak pulang dari sekolahan



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 15)

Dari tabel di atas dapat terlihat yang menjawab selalu memeriksa dan menanyakan hasil belajar anak-anak apabila pulang sekolah sebanyak 29 orang (29 %) ini berarti hanya sebagian kecil yang benar-benar peduli dan perhatian terhadap perkembangan anak sedangkan yang lainnya menjawab ada sebagian yang perhatian tapi lebih mementingkan pekerjaan sedangkan sebagian lagi yang tidak perhatian sama sekali, hal ini akan berakibat pada kemampuan anak-anak dan perkembangan anak sekolah tidak akan berkembang karena kurangnya perhatian dari orang tua, yang berdampak mereka akan menjadi siswa yang tidak berprestasi sehingga susah untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian alasan mereka yang tidak mau menyekolahkan anaknya apabila tidak ada bantuan dari pemerintah yaitu dengan alasan klasik yaitu keadaan perekonomian keluarga yang tidak sanggup untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu pendidikan orang tua yang rendah juga mempengaruhi hal tersebut karena dengan pendidikan orang tua yang rendah mereka tidak bisa untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, karena mereka hanya bekerja menjadi buruh tani dan bekerja di kebun menjadi buruh.

Diagram 4.21
Tanggapan mengenai apakah bekerja dirumah lebih penying daripada bersekolah



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 16)

Dari tabel di atas dapat dilihat yang menjawab tidak setuju 46 orang (46 %) dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 14 orang 14 %, ini berarti sudah sebagian besar masyarakat Kecamatan Baros yang menganggap sekolah itu lebih penting daripada bekerja membantu dirumah. Tetapi dari data di atas perbandingannya sangat kecil terhadap mereka yang menjawab setuju yaitu sebanyak 38 orang (38%) yang menjawab setuju dan 2 (2%) orang yang menjawab sangat setuju yang mana meskipun sedikit lebih kecil dari yang menjawab tidak setuju akan berdampak sangat besar terhadap program yang di cangkakan oleh pemerintah dalam program wajib belajar Sembilan tahun. Yang akibatnya anak-anak tidak

akan sekolah mereka banyak yang bekerja membantu orang tua dirumah sehingga untuk mendapatkan pekerjaan di dunia pekerjaan sangat susah.

5. Dimensi Penerimaan Kembali Hasil Penelitian

Dimensi Penerimaan Kembali Hasil Penelitian mencakup pertanyaan dari kuesioner dari no 17 – 20 yaitu : Tanggapan mengenai sejauh mana bantuan pemerintah dapat membantu biaya sekolah, Tanggapan tentang pemenuhan fasilitas disekolah ana-anak, Tanggapan mengenai ketika ana-anak sudah bersekolah dan Tanggapan mengenai keterjaminannya seseorang apabila sekolah sampai jenjang yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan

Diagram 4.22

Tanggapan mengenai sejauh mana bantuan pemerintah dapat membantu biaya sekolah

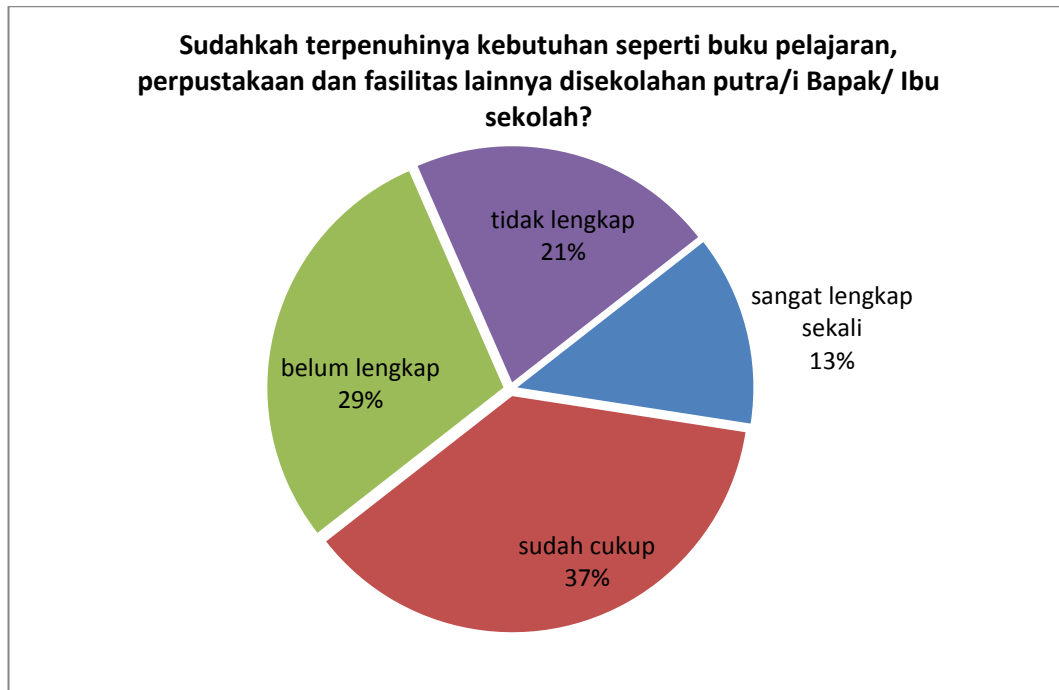


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 17)

Dari tabel diatas dapat terlihat jelas perbandingannya antara mereka yang benar-benar merasakan bantuan dari pemerintah dalam pendidikan dan bagi yang tidak atau kurang merasakan bantuan dari pemerintah, yang mana perbandingannya sama yaitu 50 % bagi mereka yang menjawab merasakan dan sangat merasakan dan 50 % lagi mereka yang menjawab tidak merasakan dan sangat tidak merasakan. Alasan mereka belum sepenuhnya merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu mereka tidak tahu bahwa selama ini mereka tidak bayar spp adalah program dari pemerintah. Selain itu untuk mereka yang jenjang sekolahnya SLTP mereka masih banyak mengeluarkan uang untuk biaya bangunan, biaya daftar ulang, membeli buku, serta biaya lainnya. Hal ini yang mengakibatkan mereka menjawab belum sepenuhnya merasakan bantuan tersebut, karena menurut mereka apabila pemerintah memberikan bantuan gratis biaya pendidikan semuanya gratis mulai dari bangunan, daftar ulang sampai penyediaan buku mereka.

Ini berarti tujuan pemerintah selama ini dalam membantu kurang begitu maksimal karena hanya setengahnya saja yang biasa merasakan bantuan tersebut sedangkan pemerintah harus bisa diatas 80% untuk mencapai keberhasilan suatu program, hal ini perlu di perhatikan dan ditinjau kembali oleh pemerintah terhadap semua kegiatan dari mulai penyaluran sampai pengawasan suatu program itu di jalankan.

Diagram 4.23
Tanggapan tentang pemenuhan fasilitas disekolah ana-anak



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 18)

Dari tabel diatas dapat dilihat 13 orang yang menjawab sangat lengkap sekali dan 37 orang yang menjawab sudah cukup, apabila disatukan baru mencapai 50 % sekolah yang memilki fasilitas yang lengkap, hal ini dapat diartikan masih banyaknya sekolah yang belum memilki fasilitas sekolah yang memadai, sedangkan untuk mencapai sekolah yang memililki kualitas dan mampu menghasilkan pendidik yang baik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Apabila fasilitas di suatu sekolah kurang out put yang di hasilkan pun tidak akan begitu baik, yang mana kebanyakan bukan menghasilkan pelajar yang berkompenten yang mampu bersaing dengan pendidik lainnya tetapi hanya mampu menghasilkan pelajar yang memilki ijazah saja. Alas an yang mendasari kurang lengkapnya fasilitas yang diberikan sekolah yaitu masih banyak sekolah

yang tidak menyediakan perpustakaan, sehingga anak tidak bisa meminjam buku untuk belajar dirumah.

Diagram 4.24
Tanggapan mengenai ketika ana-anak sudah bersekolah



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 19)

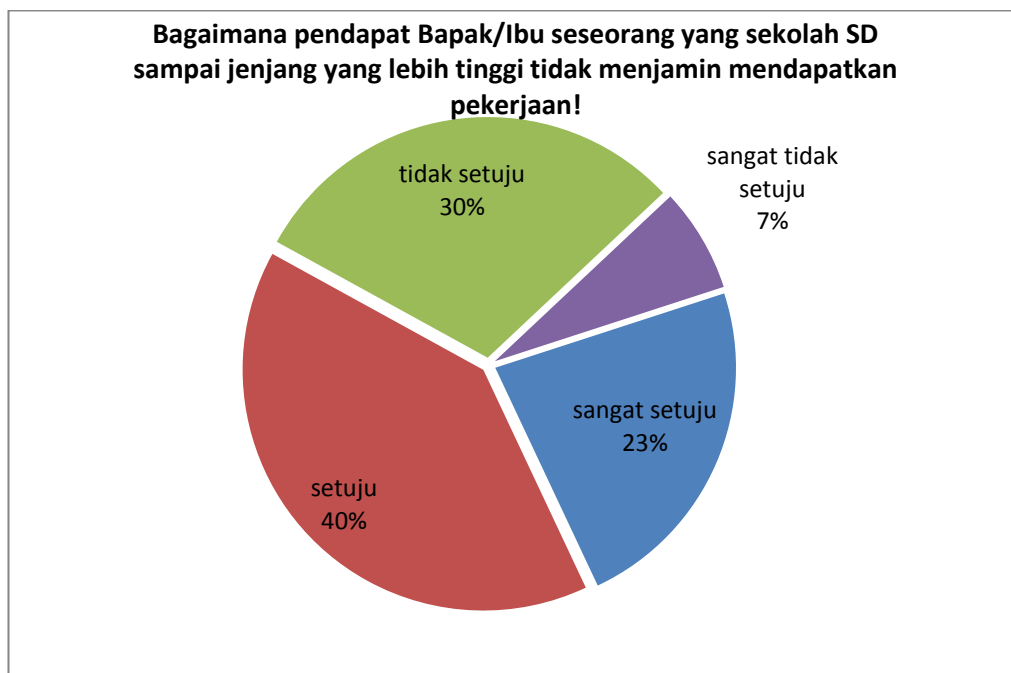
Dari tabel diatas dapat dilihat mereka yang menjawab adaperubahan menjadi lebih pintar dan menjadi pintar berjumlah 57 orang (57%). Ini dapat diartikan semakin besar orang yang menganggap dengan bersekolah anak mereka menjadi lebih pintar semakin banyak pula mereka yang mau menyekolahkan anaknya baik dari jenjang SD maupun sampai jenjang perguruan tinggi atau minimal mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat SLTP apabila bagi mereka yang kesulitan dalam faktor ekonomi keluarga.

Dapat dilihat pula perbandinganya sangat kecil dengan mereka yang menganggap tidak ada perubahan ketika mereka sekolah 47 orang atau (47 %), hal

ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari orang tua sebagaimana diatas dapat dilihat masih banyak orang tua yang belum sadar untuk memperhatikan anaknya ketika mereka pulang dari sekolah. Meskipun dengan perbedaan yang kecil tetap saja pemerintah setempat harus lebih bekerja keras agar supaya mereka yang mengikuti sekolah dapat mencapai hasil yang baik meskipun kurangnya perhatian dari orang tuanya, dengan fasilitas sekolah yang cukup dan tenaga pengajar yang berkompeten insyallah akan merubah pola pikir masyarakat setempat.

Diagram 4.25

Tanggapan menegnai keterjaminannya seseorang apabila sekolah sampai jenjang yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 20)

Dari tabel diatas dapat dilihat orang yang menjawab setuju dan sangat setuju berjumlah 63 orang (63%) hal ini dapat diartikan masih banyak sekali orang yang memiliki pola pikir ketika mereka sekolah sampai SLTP bahkan sampai jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SLTP belum tentu mereka mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan pola pikir yang seperti ini akan mengurangi partisipasi mereka untuk menyekolahkan anaknya. Karena mereka menggapa dengan lulus sekolah mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik tetapi dengan pola pikir yang seperti itu mereka menganggap percuma bersekolah tinggi pada akhirnya menganggur dan tetap bekerja menjadi petani untuk membantu orang tua. Kekhawatiran masyarakat ini lah yang perlu dirubah pola pikirnya agar tidak semakin banyak orang yang tidak bersekolah yang diakibatkan pola pikir orang tua yang salah Serta tingkat pendidikan orang tua yang rendah pula.

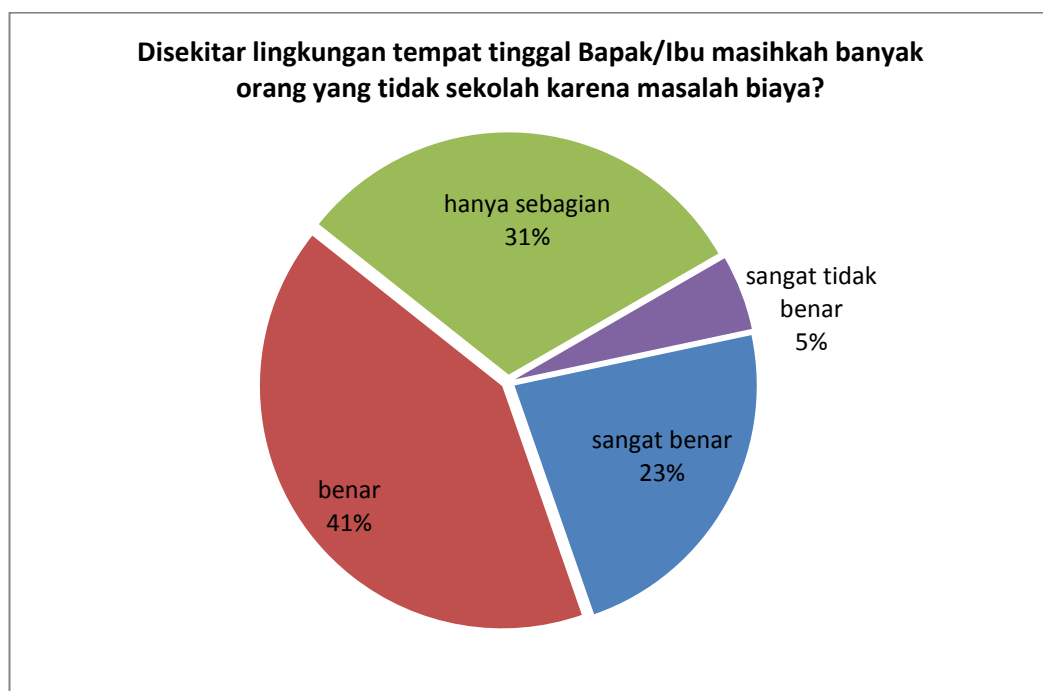
Selain hal diatas yang disebutkan yaitu karena mereka menganggap lebih baik bekerja dirumah meskipun dengan hasil yang sedikit bisa melihat mereka baik ketika susah maupun ketika senang serta memang banyak para pemuda yang menganggur sehingga dengan adanya hal tersebut mereka enggan untuk menyekolahkan anaknya kejenjang sekolah yang lebih tinggi.

6. Dimensi Penilaian Hasil Pembangunan

Dimensi Penilaian Hasil Pembangunan mencakup pertanyaan dari kuesionar no 21-25, yaitu : Tanggapan mengenai adanya orang yang masih belum sekolah karena faktor biaya di lingkungan sekitar tempat tinggal, Tanggapan

mengenai hasil dari adanya BOS(biaya gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya sekolah), Tanggapan mengenai bersekolah dapat membantu dalam memberantas kemiskinan, Tanggapan mengenai dengan bersekolah dapat memberantas kebodohan dan Tanggapan mengenai sekolah sampai tingkat SLTP sederajat dapat mengurangi jumlah pengangguran

Diagram 4.26
Tanggapan mengenai adanya orang yang masih belum sekolah karena faktor biaya di lingkungan sekitar tempat tinggal



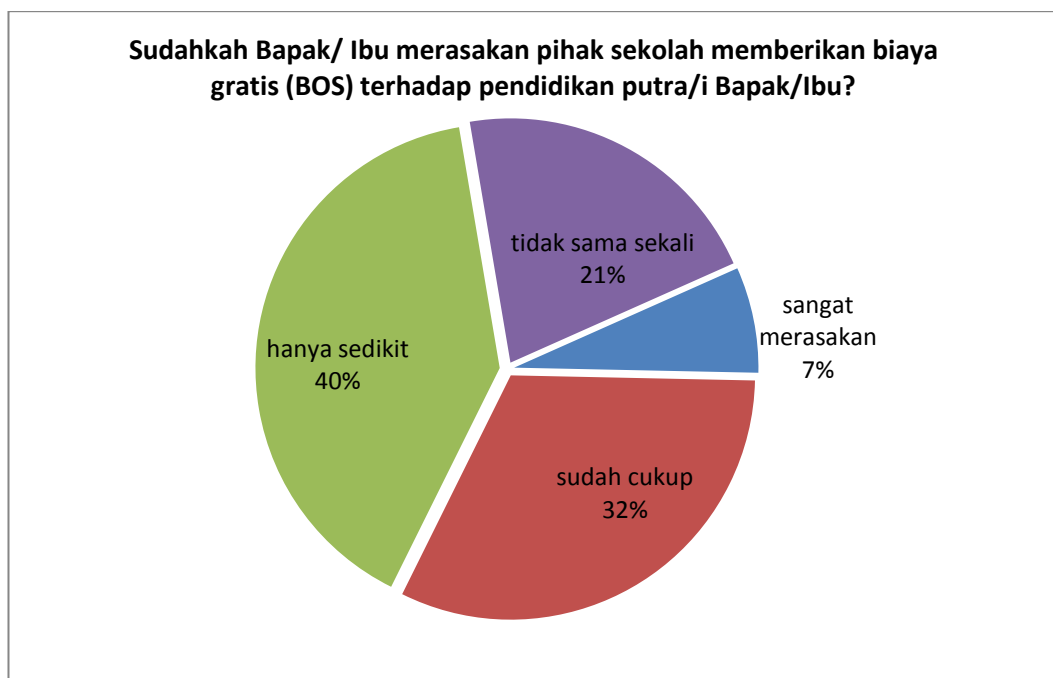
Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 21)

Dari table diatas dapat dilihat sebagian besar menjawab benar yaitu berjumlah 41 orang (41 %) dan 23 (23%)orang yang menjawab sangat benar bahwasanya disekitar tempat tinggal masyarakat Kecamatan Baros masih banyak orang yang tidak sekolah dikarenakan karena faktor biaya. Ini dapat diartikan

semakin banyaknya orang yang tidak memiliki biaya untuk membiayai anaknya untuk sekolah atau perekonomian masyarakat yang rendah akan mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak bias sekolah karena penghasilan orang tua yang tak sanggup untuk membiayai mereka sekolah, kebanyakan dari masyarakat sekitar bukan karena mereka tidak mampu membayar biaya sekolah saja, akan tetapi tidak sanggup memberikan mereka uang untuk transportasi seperti uang jajan dan uang kendaraan bagi mereka yang jauh untuk menempuh tempat kesekolahan.

Diagram 4.27

Tanggapan mengenai hasil dari adanya BOS(biaya gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya sekolah)

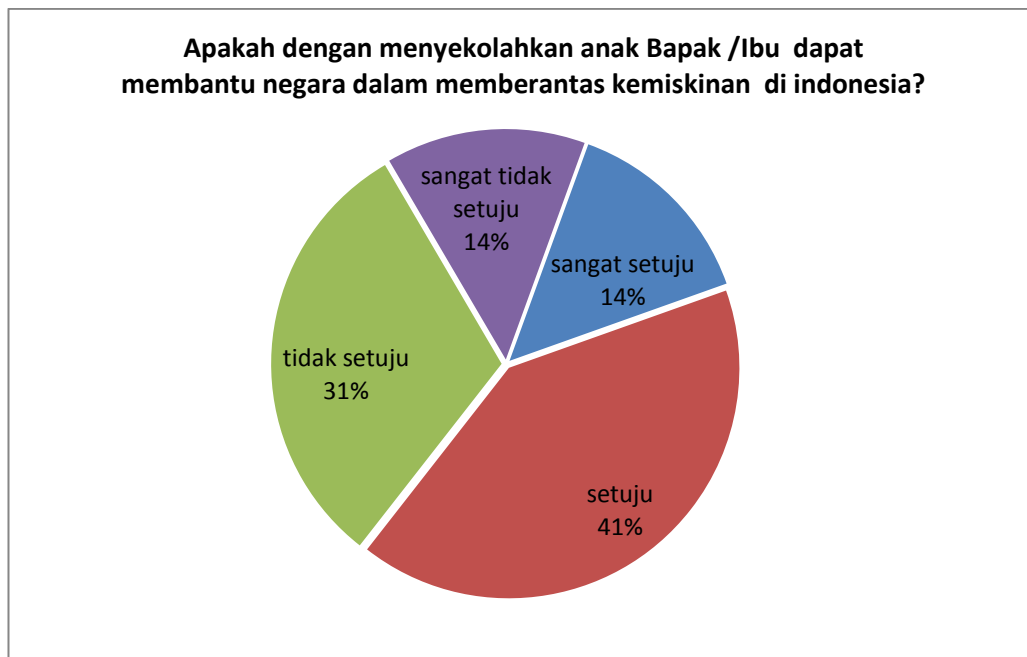


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 22)

Dari table diatas dapat dilihat 32 orang (32%) menjawab sudah cukup dan 7 orang (7%) yang menjawab sangat merasakan akan adanya bantuan dari pemerintah berupa BOS. Yang mana BOS merupakan bantuan yang diberikan kepada Masyarakat sebagai upaya untuk mensukseskan program wajib belajar Sembilan tahun yang berupa pembebasan SPP serta penyediaan buku buat seluruh siswa tingkat SLTP/ sederajat dan SD/ Sedrajat. Dari jawaban terlihat masih sedikit mereka yang benar-benar merasakan adanya BOS tersebut dan sebagian besar dari mereka masih belumbegitu merasakan akan adanya bantuan tersebut hal ini merupakan apakah karena mereka yang tidak tahu program tersebut atau memang pihak sekolah yang tidak memaksimalkan adanya BOS tersebut.

Apabila hal ini tetap dirasakan oleh masyarakat, yang mana bantuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tetap masih banyak mereka yang menganggap tidak merasakan akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan program wajib belajar Sembilan tahun

Diagram 4.28
Tanggapan mengenai bersekolah dapat membantu dalam memberantas kemiskinan



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 23)

Dari data diatas dapat dilihat mereka yang menjawab setuju berjumlah 41 orang (41%) dan yang menjawab sangat setuju berjumlah 14 orang (14 %) mengenai bahwa dengan sekolah dapat membantu pemerintah dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Ini berarti hanya sebagian kecil mereka yang tidak setuju bahwasanya dengan sekoah akan membantu mengurangi kemiskinan, apabila pola masyarakat yang seperti ini terus ditingkatkan dan di berikan sosialisasi oleh pemerintah daerahnya bahwa kemiskinan di akibatkan ooleh tingkat pendidikan yang rendah akan menambah tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan di Indonesia ini terutama di Kecamatan Baros.

Diagram 4.29

Tanggapan mengenai dengan bersekolah dapat memberantas kebodohan



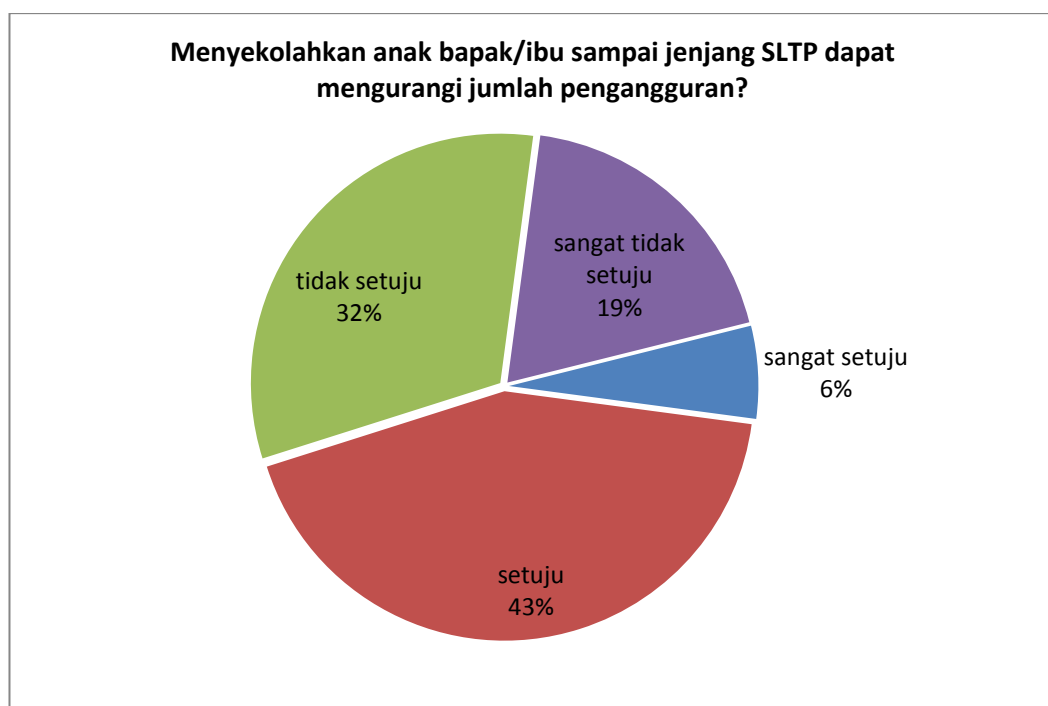
Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 24)

Dari hasil kuesionar dapat terlihat banyak yang tidak setuju dengan pertanyaan apabila dengan bersekolah dapat memberantasa kebodohan yaitu mencapai 37 % atau 17 orang yang menjawab dalam hal ini cukup besar angka yang di peroleh. Hal ini di akbitakan karena menurut mereka pintar atau bodoh seseorang bukan karena mereka bersekolah tapi karena keinginan mereka sendiri, percuma pergi kesekolahan tetapi mereka tetap saja bodoh, lebih baik dirumah saja. Selain itu faktor ekonomi juga ikut mendorong hal ini serta faktor kebudayaan masyarakat yang ikut mempengaruhi pola pikir yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sekitar. Karena dengan kebudayaan itu lah sehingga mereka tidak mau berfikir maju, seharusnya pemerintah harus memperhatikan hal ini, Karena

apabila di biarkan ini program yang di canangkan oleh pemerintah akan susah untuk di capai.

Diagram 4.30

Tanggapan mengenai sekolah sampai tingkat SLTP sederajat dapat mengurangi jumlah pengangguran



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 25)

Dari data diatas dapat terlihat jelas 43 orang (47%) menjawab setuju dan 6 orang (6%) yang menjawab setuju bahwa dengan bersekolah dapat mengurangi jumlah pengangguran. Ini dapat diartikan measih sebagian besar masyarakat kecamatan Baros menganggap pendidikan itu tidak menjamin mereka tidak akan menganggur, mereka menganggap pengangguran akan menghampiri siapa saja baik mereka yang bersekolah tinggi ataupun yang tidak sekolah sama sekali, begitu juga sebaliknya. Jadi banyak dari mereka yang beranggapan pekerjaan seseorang

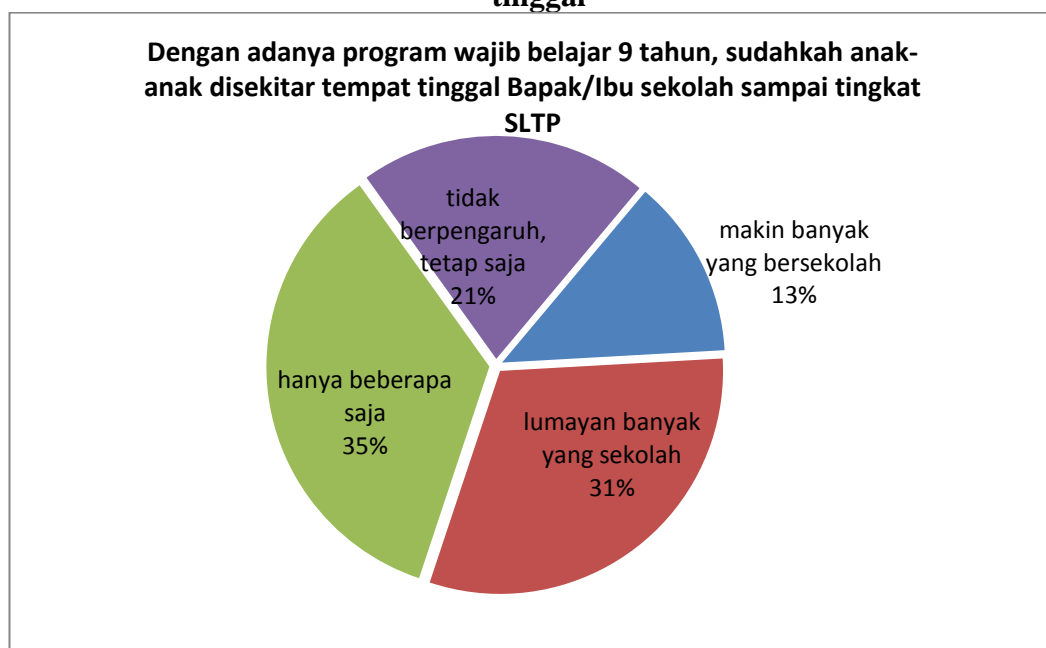
itu hanya keberuntungan bagi mereka yang mendapatkannya buka karena mereka berpendidikan tinggi. Apabila polapikir ini terus berada di tengah perkembangan zaman akan merugikan bangsa itu sendiri, Karena dengan pola piker yang seperti ini membuat partisipasi mereka dalam dunia pendidikan aan rendah.

7. Dimensi Proses Stimulus / Pemberian Motivasi

Dimensi Proses Stimulus / Pemberian Motivasi menakup pertanyaan dari no 26 dan 27 yaitu : Tanggapan menegnai adanya program wajib belajar Sembilan tahun dapat meningkatkan orang yang bersekolah sampai SMP di lingkungan tempat tinggal dan Tanggapan mengenai apabila anak-anak mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya

Diagram 4.31

Tanggapan menegnai adanya program wajib belajar Sembilan tahun dapat meningkatkan orang yang bersekolah sampai SMP di lingkungan tempat tinggal

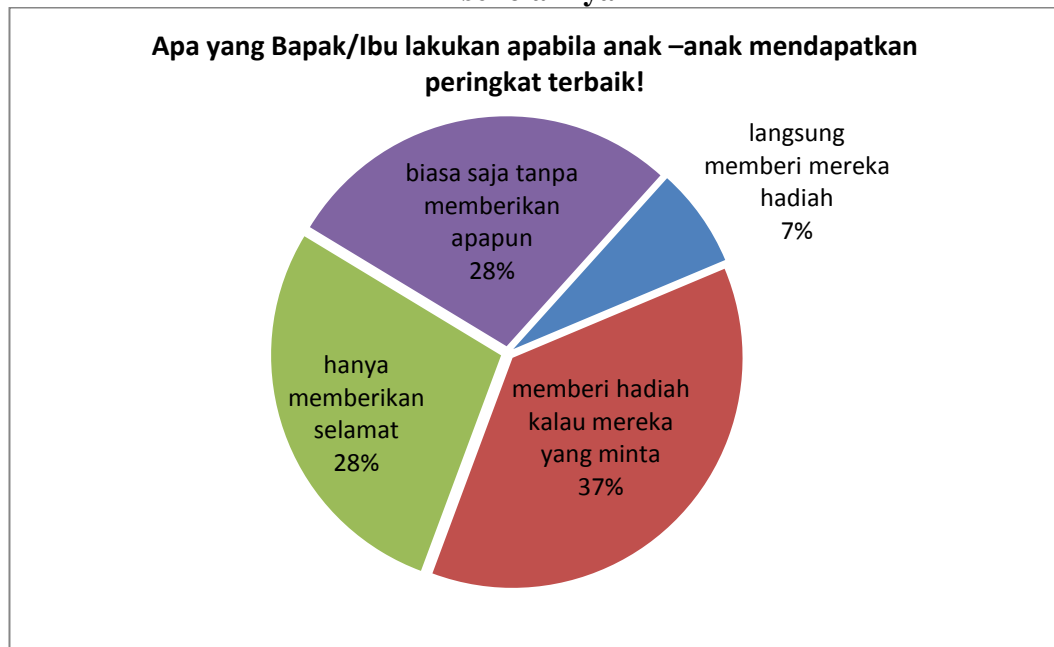


Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 26)

Dari table diatas dapat dilihat 13 orang (13%) yang menjawab makin banyak yang bersekolah dang 31 orang (31%) yang menjawab lumayan banyak yang sekolah. Jada hanya berjumlah 44% yang menjawab ada perubahan yang baik setelah adanya program wajib belajar sekolah dalam menyekolahkan anak-anak untuk besekolah. Tetapi hal ini masih sedikit sekali program wajibbelajar Sembilan tahun bias terlaksana. Karena sebagiam besar dari masyarakat yang menganggap tidak ada perubahan bagi mereka yang mau menyekolahkan anaknya meskipun adanya program tersebut. Hal ini diakibatkan kurang tahunya masyarakat akan adanya program dari pemerintah yang menyatakan biaya sekolah gratis dengan adanya BOS, kedaan ekonomi yang rendah yang di tunjang dengan pendidikan orang tua yang rendah pula, serta ketidak pedulian mereka dalam dunia pendidikan. Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri di sawah dan kebun. Hal ini terbukti juga dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimana di beberapa daerah masih banyak terdapat orang yang masih belum bisa melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi atau dalam hal ini tingkat sekolah SLTP.

Diagram 4.32

Tanggapan mengenai apabila anak-anak mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya



Sumber : data diolah penelitian 2012 (Kuesioner No. 27)

Dari table diatas dapat terlihat jelas hanya 7 orang (7%) yang menjawab langsung memberikan hadiah dan 37 orang (37%) yang menjawab memberikan hadiah kalau mereka yang meminta apabila anak-anak mereka mendapatkan peringkat kelas atau menjadi yang terbaik di kelasnya. Hal ini dapat diartikan kurangnya motivasi dan perhatian orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak. Karena dengan perhatian dan motivasi dari orang tua lah anak-anak bias semangat dan mau untuk pergi kesekolah, tatpai apabila orang tua beriskap acuh dan biasa saja tidak akan tidak mungkin prestasi anak akan menurun di sekolahnya dan sikap seperti bolos dan yang lainnya akan terjadi sehingga mereka bias saja berhenti sekolah atau dikeluarkan dari sekolahnya. Hal ini dipengaruhi karena factor pendidikan orang tua yang rendah sehingga mereka tidak tahu akan

pentingnya perhatian dari orang tua untuk meningkatkan prestasi anak yaitu dengan cara memberikan perhatian lebih kepada anak, kebudayaan juga mempengaruhi krena kebiasaan di kampung mereka tidak pernah respek dengan apa yang didapat anak dari sekolah.

4.4. PENGUJIAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat paling tinggi baru mencapai 65% dalam wajib belajar sembilan tahun”. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai berikut.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Skor ideal untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Baros adalah $4 \times 27 \times 100 = 10800$ (4 = nilai dari setiap jawaban selalu setiap pertanyaan/pernyataan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert. 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden. 27 = jumlah pertanyaan/pernyataan yang ditanyakan kepada responden) dan nilai mean/nilai rata-rata nya adalah $10800 : 100 = 108$.

Sehingga untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros, nilai yang dihipotesiskan tertinggi mencapai 65% dari yang diharapkan, ini berarti bahwa $65\% = 0,65 \times 108 = 70,2$. Hipotesis

statistik dapat dirumuskan sebagai berikut : Ho untuk memprediksi μ lebih kecil atau sama dengan ($\leq 65\%$) dari skor ideal paling tinggi. Sedangkan Ha lebih besar dari 65% ($> 65\%$) dari skor ideal yang diharapkan. Atau dapat dituliskan dengan rumus:

$$H_0 = \mu \leq 65\% \leq 0,65 \times 10800 : 100 = 70,2$$

$$H_a = \mu > 65\% > 0,65 \times 10800 : 100 = 70,2$$

Diketahui :

$$\bar{X} = \Sigma X : 100 = 6704 : 100 = 67,04$$

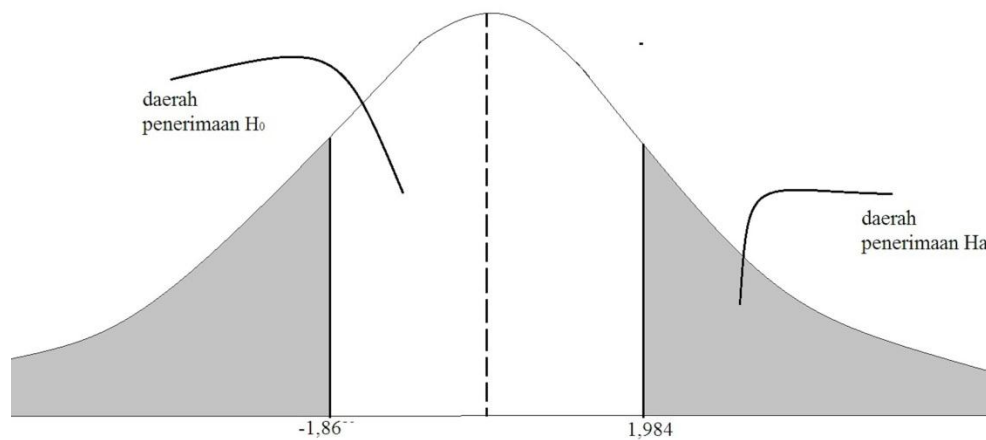
$$\mu_0 = 65\% = 0,65 \times 108 : 100 = 70,02$$

$$s = 16,02$$

$$n = 100$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{67,04 - 70,02}{\frac{16,02}{\sqrt{100}}} \\ &= \frac{-2,98}{1,602} \\ &= -1,86 \end{aligned}$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 100 - 1 = 99$ dan taraf kesalahan $\alpha = 2,5\%$ untuk uji satu pihak (*one tail test*) uji pihak kanan, karena harga t hitung lebih kecil dari pada harga t tabel atau $H_a (-1,86 < 1,984)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya.



Dari diagram diatas menunjukkan H_0 di terima atau H_a ditolak, ini berarti hipotesis peneliti yang berbunyi masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar Sembilan tahun di Kecamatan Baros Kabupaten Serang sudah terjawab. Yang mana artinya memang benar di kecamatan baros tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar Sembilan tahun masih rendah yang hanya baru mencapai 62,07 % dari hipotesis yang di berikan oleh peneliti yaitu 65 %.

4.5. INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, hal yang paling penting dan diutamakan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, kita dapat melihatnya dari hasil penghitungan dengan menggunakan seperti dalam perhitungan t-test satu sampel, berdasarkan penghitungan pada pengujian hipotesis t-test satu variabel didapatkan bahwa ternyata t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel, dan hal itu dapat diartikan bahwa H_0 diterima. Karena mencapai 62,07 % kurang dari 65%.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah $4 \times 27 \times 100 = 10800$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, 27 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 6.704. dengan demikian nilai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Baros adalah $6.704 : 108 = 62,074$ atau 62,07 persen.

Kemudian mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros adalah sebesar 62,07 persen. Analisis berikutnya dilihat dari unsur partisipasi masyarakat yang akan di lakukan analisis perdimensi, adapapun hasilnya dapat dilihat dala tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Analisis Hipotesi Penelitian

No	Dimensi	Persentase (%)
1	Penerimaan Informasi	54,2 %
2	Pemberian tanggapa terhadap informasi	74,1 %
3	Perencanaan program wajib belajar sembilan tahun	64,5 %
4	Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun	63%
5	Penerimaan kembali hasil program wajib belajar sembilan tahun	61,2%
6	Penilaian hasil program wajib belajar sembilan tahun	59,7%
7	Proses stimulus / motivasi	57,3%
	Rata-rata	62,07

Sumber data diolah penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diuraikan hasil perhitungan analisis yang dilakukan peneliti, adapun untuk dimensi yang pertama yaitu penerimaan informasi adalah $4 \times 100 \times 2 = 800$. (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 434 . Dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan informasi $434:800 = 0,542$ atau 54,2 persen.

Kemudian untuk unsur partisipasi masyarakat yakni pemberian tanggapan terhadap informasi adalah $4 \times 2 \times 100 = 800$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 593 dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan informasi adalah sebesar $593:800 = 0,741$ atau 74,1 persen.

Kemudian untuk unsur perencanaan pembangunan adalah $4 \times 3 \times 100 = 1200$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 3 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 775 . dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan $775:1200 = 0,645$ atau 64,5 persen. Kemudian untuk unsur pelaksanaan pembangunan adalah $4 \times 9 \times 100 = 3600$ (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 9 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden).

Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 2269 . dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan $2269:3600 = 0,63$ atau 63%

Kemudian untuk unsur penerimaan kembali hasil pembangunan adalah $4 \times 4 \times 100 = 1600$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, $4 =$ jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, $100 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 980 . dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam penerimaan kembali hasil pembangunan $980:1600 = 0,612$ atau 61,2 persen. Kemudian untuk unsur mengetahui perkembangan dan keberhasilan program serta menilai keberhasilan suatu program dalam pendidikan adalah $4 \times 5 \times 100 = 2000$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, $5 =$ jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, $100 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 1.194. dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kesediaan untuk berperan serta $1.194:2000 = 0,597$ atau 59,7 persen.

Kemudian untuk unsur yang terakhir yaitu proses stimulus/motivasi diri dan orang lain untuk mensukseskan program yang ada adalah $4 \times 2 \times 100 = 800$ ($4 =$ nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, $2 =$ jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, $100 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah sebesar 459 . dengan demikian nilai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses stimulus/motivasi diri dan orang lain untuk mensukseskan program yang ada serta $459:800 = 0,573$ atau

57,3 persen. Jadi secara umum dari hasil perhitungan diatas rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun memang belum baik dengan hasil 62,07%. merupakan tolak kurang berhasilnya program wajib belajar sembilan tahun dalam menentukan arah pembangunan melalui unsur pendidikan dengan keterlibatan masyarakat.

4.6. PEMBAHASAN

pembahasan ini akan memaparkan tentang pengujian hipotesis yang menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. data tersebut dapat dijelaskan bahwa "tingkat partisipasi masyarakat dalam wajib belajar sembilan tahun di kecamatan baros mencapai angka 62,07 %, artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun belum baik.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut Dari hasil kuesioner yang telah diolah terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang kemudian disebut sebagai faktor penghambat, yang mana faktor tersebut ialah:

1. Karena tingakat pendidikan orang tua yang rendah: rendahnya tingkat pendidikan orang tua akan menghasilkan pola pikir yang sempit yang mana banyak mereka yang menganggap tidak perlu sekolah tinggi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari- hanya dengan ketekunan dan kemauan pasti bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dari seratus orang responden didapat dari segi pekerjaan kebanyakan bekerja

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 39% dan laki-laki kebanyakan sebagai buruh tani yaitu sebanyak 29 %. Serta petani 13% sisianya sebagai pedagang, wiraswasta, sopir dan guru. Dari pendidikan 61% orang penduduk yang lulusan SD dan 31% orang lulusan SLTP. Sesuai dengan yang di program kan oleh pemerintah tingkat SD dan SLTP merupakan tingkat minimum/ tingkat terendah seseorang harus mengikuti jenjang pendidikan yang ada di indonesia.

2. Dorongan atau motivasi dari orang tua yang kurang di berikan kepada anak-anaknya ini dapat dilihat dari butir pertanyaan yang di berikan kepada responden, yang terdapat dalam butir pertanyaan no 27 yaitu ketika anak mendapatkan peringkat terbaik dikelasnya hanya sedikit orang tua yang menjawab atau memberikan respon langsung memberikan hadiah hanya yaitu sekitar 7 orang, padahal dengan pemberian hadiah itu akan meningkatkan belajar mereka dan membuat mereka semakin semangat untuk belajar. Selain itu dapat pula dilihat dari butir pertanyaan no 15 yaitu ketika anak pulang sekolah apa yang dilakukan oleh para orang tua. Hanya 29 orang yang menjawab selalu memeriksa dan menanyakan hasil belajar anak. Padahal dengan selalu memeriksa dan menanyakan hasil belajar anak setiap pulang sekolah merupakan bentuk motivasi yang sangat besar karena dengan selalu ditanya mereka merasa diperhatikan dan ketika mereka diperhatikan mereka ingin selalu terlihat baik di didepan orang tuanya dengan begitu keinginan mereka untuk belajar akan semakin tinggi. dengan

ini dapat dilihat kurangnya motivasi atau dorongan dari orang tua yang mana kurangnya motivasi atau dorongan dari orang tua akan mengakibatkan anak malas untuk belajar dan tidak bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dari sekolah yang pada akhirnya prestasinya menurun dan malas untuk melanjutkan sekolah.

3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Baros akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dalam butir pertanyaan no 1 yaitu 3 orang yang menjawab rutin dan 9 orang yang menjawab sering, yang lainnya menjawab tidak pernah dan jarang. Dari sini sudah terlihat pemerintah desa yang seharusnya rutin dalam mensosialisasikan program-program yang ada tapi mereka sangat kurang dalam melaksanakan hal itu. Dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang didapat oleh masyarakat, sehingga akan mengakibatkan mereka kurang berpartisipasi dalam suatu program atau bahkan tidak akan berpartisipasi karena ketidaktahuan itu. Dalam hal ini masyarakat akan selalu bersifat pasif karena mereka tidak diperkenalkan bagaimana untuk bersifat aktif.
4. Faktor lingkungan: faktor terbesar adalah lingkungan masyarakat sekitar, apabila lingkungannya baik akan berdampak baik tetapi apabila lingkungannya buruk akan berdampak buruk pula. Kebanyakan di

Kecamatan Baros mereka yang tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan faktor lingkungan, yang mana banyak anak-anak yang tidak bersekolah akan mengakibatkan kepada yang lainnya untuk tidak bersekolah. Ini terbukti dengan jawaban responden dalam butir pertanyaan no 21 sekitar 64 orang yang menjawab masih banyak orang yang tidak sekolah karena faktor ekonomi, dengan kata lain masih banyak di kecamatan baros yang masih tidak sekolah baik jenjang SLTP maupun jenjang SD dalam hal ini lebih banyak orang yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTP.

5. Jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah yang jauh. Di kecamatan Baros masih terdapat lumayan cukup banyak daerah yang jarak dari rumah ke sekolah sangat jauh terutama untuk tingkat sekolah SLTP. Disamping perekonomian yang rendah salah satunya ialah jarak yang membuat mereka malas untuk pergi ke sekolah, karena dengan jarak yang begitu jauh mereka perlu uang untuk pergi ke sekolah. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengambil satu contoh daerah yaitu di desa sindangmandi yaitu hanya terdapat 2 sekolah SLTP, kedua tempat tersebut jauh dari tempat tinggal masyarakat dari kampung yang lainnya karena disana masih merupakan daerah hutan yang mana jarak dari 1 kampung ke kampung lainnya jauh dengan di batasi hutan / kebun serta wilayahnya luas. Misalkan dari kp rampones untuk sampai ke SMPN 2 baros menempuh jarak 3 km menempuh selama 1:30 menit.

Secara keseluruhan prinsip partisipasi di Kecamatan Baros termasuk dalam kategori rendah mencapai 62 % dari angka minimal 65% sebagaimana dari hasil penelitian bahwa dimensi partisipasi masyarakat untuk yang pertama yaitu penerimaan informasi 54,2%, kemudian dimensi partisipasi masyarakat yakni pemberian tanggapan terhadap informasi 74,1%. Untuk dimensi perencanaan pembangunan di dapat 64,5%. Untuk dimensi pelaksanaan pembangunan yaitu 63 %. untuk penerimaan kembali hasil pembangunan 61,2%. Untuk penilaian hasil pembangunan 59,7%. Kemudian untuk dimensi yang terakhir yaitu proses stimulus/motivasi adalah sebesar 57,3%. dan Kemudian hal ini merupakan hal yang perlu di perbaharui dan di evaluasi kembali program yang sudah ada agar program tersebut bisa berhasil, yang mana perencanaan untuk menuju program 12 tahun bisa cepat berjalan , karena pendidikan merupakan unsur terpenting dalam pembangunan suatu negara. Berikut disajikan kelompok daerah yang diklasifikasikan berdasarkan daerah yang termasuk kedalam daerah yang tertinggal, sedang dan daerah yang sudah lumayan baik dalam pendidikan, dari 14 desa yang terdapat di Kecamatan Baros, karena pada hakikatnya kemampuan setiap desa itu berbeda dalam pengelolaanya sehingga berbeda pula tingkat perkembangannya. jadi peneliti perlu mengklasifikasikan daerah tersebut yang dilihat dari tingkat pendidikan serta kesejahteraan masyarakat/ ekonomi masyarakat maupun kebudayaan sosial masyarakat .

Tabel 4.7. Kualifikasi Kategori Desa

No	Kategori	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumah Sekolah	Keterangan
1	Rendah	Desa Taman Sari	3.717	1 SD	
2		Desa Tejamari	3.694	2 SD	
3		Sinar Mukti	2.162	1 SD	
4		Curug Agung	2.674	1 SD	
5		Cisalam	3.679	2 SD	
6		Padasuka	2.927	1 SD	
7		Desa Sindang Mandi	4.717	4 SD & 2 SLTP	faktor sosial budaya masyarakat dan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi
8	Sedang	Suka Indah	3.270	1 SD	jarak dari rumah kesekolah yang, sehingga cukup banyak yang sekolah
9		Desa Sukacai	3.200	2 SD	jarak dari rumah kesekolah yang, sehingga cukup banyak yang sekolah
10		Desa Sidamukti	3.972	2 SD dan 1 SLTP	
11		Sukamenak	4.952	2 SD dan 1 SLTP	
12	Baik/Bagus	Desa Sukamanah	3.177	3 SD, 3 SLTP & 3 SMA	
13		Desa Baros	6.554	4 SD	jarak dari rumah kesekolah yang, sehingga cukup banyak yang sekolah dan tepat berada di pusat pemerintahan Kecaamatan Baros
14		Desa Panyirapan	4.348	3 SD, 1 SLTP & 1 SMA	
	total		53.043		

sumber diolah data penelitian 2012

Kemudian rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat Kecamatan Baros yang hanya mencapai 62 % sebagaimana masyarakat unsur terpenting dalam

mensukseskan suatu program / kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat juga merupakan sumber informasi yang terpercaya dalam mengetahui suatu program itu dapat berjalan atau tidak. Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut untuk dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang program wajib belajar sembilan tahun, merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan limabelas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar . Untuk itu perlu diciptakan suatu kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta terwujudnya kreatifitas dan aktifitas di kalangan masyarakat”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah akan terlihat dari perilaku mendukung dan melaksanakan kegiatan program pembangunan yang dilaksanakan.

Kajian utama dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam program Wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros. Banyak definisi tentang partisipasi Menurut *Ndraha* mengatakan partisipasi sebagai kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata

uang, tidak dapat di pisahkan, tetapi dapat dan perlu di bedakan. Masyarakat desa yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.

Selanjutnya *Ndraha* dalam Makmur (2008: 156-157) mengatakan bahwa partisipasi sebagai masukan dan keluaran: Sebagai masukan: partisipasi masyarakat dapat berfungsi menjadi enam fase proses pembangunan yaitu: Fase penerimaan informasi, Fase pemberian tanggapan terhadap informasi , Fase perencanaan pembangunan, Fase pelaksanaan pembangunan, Fase penerimaan kembali hasil pembangunan dan Fase penilaian hasil pembangunan. Dan Sebagai masukan partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakan dan di bangun sebagai keluaran proses stimulus atau motivasi melalui berbagai upaya. Mengingat bahwa program wajib belajar sembilan tahun dalam implementasinya, menempatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung program wajib belajar sembilan tahun dimaksud.

Sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan . dari pemerintah, kondisi perekonomian masyarakat yang rendah akan berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Baros, karena orang tua tidak mampu untuk menyediakan sarana belajar bagi anak. Karena sebagian masyarakat di Kecamatan Baros yang tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan factor ekonomi keluarga yang sangat rendah, bukan hanya itu faktor yang lain seperti

pendidikan orang tua yang rendahpun ikut mempengaruhi, pola pikir orang tua yang kolot serta jarak sekolah kerumah yang lumayan masih jauh.

Pentingnya partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi, alasan atau pertimbangannya adalah anggota masyarakat dianggap bahwa mereka mengetahui sepenuhnya tentang masalah dan kepentingan atau kebutuhan mereka: Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonominya, Mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi, Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang di hadapi Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni tentang tingkat partisipasi yang berjudul "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros. Yang mana diketahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam wajib belajar Sembilan Tahun di Kecamatan Baros masih dikatakan rendah yang mana hanya mencapai 62,07 % dari angka maksimal yang di hipotesiskan oleh peneliti yakni 65%. Dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kurangnya partisipasi masyarakat dalam wajib belajar sembilan tahun ditemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat memiliki beberapa unsur penting meliputi: penerimaan informasi 54,2%, kemudian dimensi partisipasi masyarakat yakni pemberian tanggapan terhadap informasi 74,1%. Untuk dimensi perencanaan pembangunan di dapat 64,5%. Untuk dimensi pelaksanaan pembangunan yaitu 63 %. untuk penerimaan kembali hasil pembangunan 61,2%. Untuk penilaian hasil pembangunan 59,7%. Kemudian untuk dimensi yang terakhir yaitu proses stimulus/motivasi adalah sebesar 57,3%.

5.2. Saran

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan maka dari hasil kajian penelitian tentang implementasi program wajib belajar sembilan tahun, penulis memberikan konsep implementasi program wajib belajar sembilan tahun sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi yang lebih sering dilakukan dari segenap elemen pemerintah maupun Pemerintah Desa
2. Perlu adanya program perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Memberikan bantuan usaha kecil kepada ibu rumah tangga dan para petani.
3. Pemerintah setempat harus lebih memperhatikan, mengawasi serta mengevaluasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syani. 1995. *Sosisologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya.
- Adi, Isnamdi Rokminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikanto, Suharsin. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Modul Pelatihan. 2011. *In Service Training Kkm MTS / MI*. Jakarta: Basic Education Project.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rukminto, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Grapindo Persada.
- Setiadi Elly M., Hakam Kama A., Efendi Ridwan. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret Unipersity Press.
- Sudadio. 2005. *Strategi Pemeberdayaan Masyarakat*. Banten: Dewan Buku Banten Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung : ALFABETA.

- Syani, Abdul.1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya.
- Syarif, Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokromidjodjo, Bintoro. 1988. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : AFABETA.

DUKUMEN

UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional
 UUD 1945

Buku Panduan Bos Untuk Pendidikn Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu Tahun 2009

SUMBER LAIN

<http://id.shvoong.com/>

<http://ilyasismailputrbugis.blogspot.com>

<http://www.gudangmateri.com>

<http://id.wikipedia.org>

